

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Volume 11 | Nomor 2 | Desember 2019

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Pelindung : Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag

Pengarah : Dr. H. nazar Naamy, M.Si

Penanggung jawab : Dr. Winengan, M.Si

Ketua Penyunting : Zaenudin Amrulloh, M.A.

Mitra Bestari :
1. Dr. Nazar Naamy, M.Si (UIN Mataram)
2. Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., P.hd(UIN Sunan Kalijaga)
3. Dr. Salviana DS, M.Si (Universitas Muhammadiyah Malang)
4. Danang Arif Darmawan, M.Si (Universitas Gadjah Mada)
5. Dr. Slamet Mulyono, M.Si (UIN Sunan Ampel)

Dewan Penyunting :
1. Prof. Dr. Suprapto, M.Ag
2. Dr. Muhammad Thohri, M.Pd
3. Abdul Najib, M.Si
4. Budiman, M.Sc
5. Dr. Muchammadun, MM

Lay-Outer : Siti Aminah, M.Si

Tata Usaha : Fuad Hasan, A.Md

Alamat

Jurnal Komunitas

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram

Jl. Pendidikan No. 35 Mataram NTB 83125

Telp. (0370) 621298, 63449 Fax. 625337

Email:journalkomunitas@gmail.com

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI ~ iv

KELOMPOK WANITA TANI (KWT) PELANGI KOPI SEBAGAI
INOVASI PEMBERDAYAAN JANDA GUNA MENGETASKAN
KEMISKINAN DI DESA GIRI MULYO

Doli Witro ~ 93

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN WISATA
PANTAI DI KAWASAN LOMBOK TIMUR

Novia Suhastini ~ 107

BATIK GEBLEK RENTENG KULON PROGO: PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN HAK CIPTA PRODUK
LOKAL OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Rahadiyand Aditiya ~ 123

GRADUASI MANDIRI: BENTUK KEBERDAYAAN PENERIMA
MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

DI KABUPATEN PATI
Nur Khoiriyah, Kunarti ~ 143

PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BERBASIS MEDIA
DIGITAL DI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Rio Febriannur Rachman ~ 72

PETUNJUK PENULISAN

TRANSLITERASI

ا : a	غ : gh
ب : b	ف : f
ت : t	ق : q
ث : ts	ك : k
ج : j	ل : l
ح : h	م : m
خ : kh	ن : n
د : d	و : w
ذ : dz	هـ : h
ر : r	' :
ز : z	يـ : y
س : s	Untuk mad dan diftong
ش : sy	أـ : â
ص : sh	يـ : û
ض : dh	وـ : û
ط : th	أـ وـ : au
ظ : zh	أـ يـ : ai
ع :	

KELOMPOK WANITA TANI (KWT) PELANGI KOPI SEBAGAI INOVASI PEMBERDAYAAN JANDA GUNA MENGETASKAN KEMISKINAN DI DESA GIRI MULYO

Doli Witro

Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Email: doliwitro01@gmail.com

Abstract: This paper intends to explore further about the widow empowerment activities carried out by the Women Farmers Group (KWT) located in Giri Mulyo Village, Kayu Aro Barat District, Kerinci Regency. As it is known, KWT Pelangi Kopi aims to improve the lives of the people of Giri Mulyo Village by prioritizing women who are widows. KWT Pelangi Kopi focuses its activities on local agricultural products, such as coffee, oranges, and turquoise eggplants. Agricultural products are processed into various products to sell, so that it can increase the income of the members. This community is important and interesting to study, because the activities / programs they run are closely related to the poverty alleviation agenda and improving people's welfare which is an important agenda of the government, even in all countries in the world. This community has become even more interesting because its members are only women and are also managed by women. Thus, besides being related to poverty and welfare issues, this community is also closely related to women's empowerment.

Keywords: KWT Pelangi Kopi, Empowerment of Widows, Poverty

A. Pendahuluan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa dalam enam tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia terus menurun.¹ Namun demikian, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) merilis laporan bahwa rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan justru meningkat.² Problem meningkatnya Rumah Tangga Miskin yang Dikepalai Perempuan (RTM-P) tampaknya juga menjadi perhatian serius pemerintah dengan masuknya isu ini ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.³

Meningkatnya angka perempuan kepala keluarga selaras dengan peningkatan angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun. Menteri Agama

¹ Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada September 2017 berada pada 10,12 persen atau 26,58 juta dari seluruh penduduk Indonesia, lalu pada September 2018 turun menjadi 9,66 persen atau sama dengan 25,67 juta dari total penduduk Indonesia. <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 1 April 2019.

² Yayasan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Laporan Tahun 2017. Jakarta: 2017, h. 2.

³ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,y Bab 1, sub poin 1.1.3, h. 1-15.

RI, Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan bahwa berdasarkan data di Kementerian Agama (Kemenag), angka perceraian pada 2015 mencapai 398.245, lalu pada 2017 meningkat menjadi 415.898.⁴ Angka ini belum termasuk perempuan yang ditinggal mati suami (cerai mati). Asumsi yang terbangun berangkat dari data tersebut, setiap kali terjadi perceraian, biasanya perempuan akan menjadi kepala di keluarganya, karena suaminya sudah tidak ada.

Perceraian berimplikasi pada munculnya peran baru perempuan dalam keluarga. Selain menjadi kepala keluarga dan mengurus anak-anak, perempuan kepala keluarga juga akan berperan penuh dalam urusan nafkah keluarganya. Kondisi ini rentan terhadap perekonomian keluarga yang semakin memburuk. Tidak jarang di antara mereka masuk ke dalam jerat rentenir.⁵ Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sebagaimana dikutip dalam Laporan Yayasan Pekka tahun 2017, juga mencatat bahwa tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan RTM-P lebih buruh ketimbang RTM-L. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan RTM-P hanya 19 persen, sementara RTM-L mencapai 25 persen.⁶

Tren angka kemiskinan ini menyebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, salah satunya Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada 2017, terdapat 17.621 orang penduduk miskin di Kabupaten Kerinci, lalu pada 2018 turun sebanyak 4,7 persen atau sama dengan 831 orang sehingga menjadi 16.790 orang.⁷ Seiring itu, terjadi juga peningkatan angka RTM-P seiring tingginya angka perceraian di Kabupaten Kerinci. Panitera Pengadilan Agama Kerinci, Auza'i, pada 27 September 2018 menyatakan bahwa angkat Perceraian di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh pada 2017 mencapai 274 perkara, lalu pada 2018 meningkat menjadi 262 perkara.⁸

⁴ Menteri Agama: *Angka Perceraian di Indonesia Meningkat*, berita pada <https://kumparan.com/2018/12/07>, diakses pada 10 April 2019

⁵ Margaretta Erna Setianingrum dan Ratriana Yuliastuti Endang Kusumiati, "Quality of Life Janda Lanjut Usia yang Tinggal di Pedesaan", *Prosiding Temui Ilmiah X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia*, Semarang: 22-24 Agustus 2017, h. 215.

⁶ Yayasan Pekka, *op. cit.* h.3

⁷ Kerincitime.co.id, *Angka Kemiskinan di Kerinci Turun 4,7 Persen*, (Online), (<https://kerincitime.co.id/>, diakses pada 10 April 2019).

⁸ *Angka Perceraian di Kerinci dan Sungai Penuh Meningkat, ini Faktor Penyebabnya*, berita pada <https://jambi.tribunnews.com/2018/09/27>, diakses pada 10 April 2018

Dari segi potensi perekonomian lokal, Kabupaten Kerinci dikenal sebagai daerah yang subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus. Ketika diadakan Festival Kopi di Jakarta pada 2017, kopi asal Kabupaten Kerinci meraih predikat “Kopi Terbaik se-Indonesia”.⁹ Kopi tersebut berjenis kopi arabika. Kopi ini terdapat setidaknya di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Kayu Aro Barat, dan Kecamatan Gunung Tujuh seluas. Selain kopi, daerah Kerinci juga menghasilkan teh, jeruk, terong pirus, dan lain sebagainya.

Dengan potensi perekonomian yang besar itu, seharusnya kemiskinan bukan lagi menjadi kondisi yang perlu dikhawatirkan oleh setiap kepala keluarga, walaupun keluarga itu dikepalai oleh seorang perempuan. Berangkat dari pandangan ini, seorang aktivis sosial, Erna Yunita, membangun sebuah komunitas beranggotakan wanita. Anggota komunitas ini terdiri dari wanita-wanita kepala yang berperan sebagai tulang punggung keluarga. Komunitas ini bernama Kelompok Wanita Tani (KWT), berlokasi di Desa Giri Mulyo, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Erna menyatakan:

Ada 20-an orang wanita yang menjadi anggota KWT Pelangi Kopi. Beberapa di antara mereka berstatus janda. KWT Pelangi Kopi bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat Desa Giri Mulyo dengan mengutamakan perempuan yang berstatus sebagai janda. KWT Pelangi Kopi memfokuskan kegiatannya pada hasil pertanian lokal, seperti kopi, jeruk, dan terong pirus. Hasil pertanian ini diolah menjadi berbagai produk untuk dijual, sehingga dapat meningkatkan penghasilan para anggota.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud menelaah lebih lanjut tentang kegiatan pemberdayaan janda yang dilakukan oleh KWT Pelangi Kopi tersebut. Komunitas ini menjadi penting dan menarik ditelaah, karena kegiatan mereka terkait erat dengan agenda pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan agenda penting pemerintah, bahkan di seluruh negara di dunia. Komunitas ini menjadi semakin menarik karena anggotanya hanya perempuan dan dikelola juga oleh perempuan. Dengan demikian, selain terkait dengan isu kemiskinan dan kesejahteraan, komunitas ini juga erat dengan pemberdayaan perempuan.

⁹ Harian Nasional, *Mengenal Kopi Kerinci, Kopi Terbaik se-Indonesia*, (Online), (<http://harnas.co/>, diakses pada 10 April 2019).

¹⁰ Erna Yunita, Ketua KWT Pelangi Kopi, Wawancara, Giri Mulyo, 19 April 2019.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan objek, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penyajian data dilakukan secara naratif deskriptif. Pada penulisan hasil penelitian, penulis menitikberatkan penalaran yang berdasarkan realitas sosial secara obyektif dan melalui paradigma fenomenologis. Paradigma fenomenologis, artinya memahami arti peristiwa dan kaitannya dalam situasi tertentu.¹¹

Penulisan dengan paradigma fenomenologis ini digunakan atas tiga pertimbangan. Pertama, untuk mempermudah pemahaman realitas ganda. Kedua, menyajikan secara hakiki antara penelitian dan realitas. Ketiga, metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri pada bentuk nilai yang dihadapi. Oleh karenanya, penulisan ini bukan hanya penulisan kepustakaan dan bukan pula kegiatan penulisan hasil penelitian lapangan saja, tetapi merupakan gabungan antara keduanya.

Dalam studi penulisan karya tulis ilmiah ini, telaah pustaka dilakukan sejak awal ketika hendak menentukan topik yang akan menjadi fokus kajian dan ketika hendak melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber dari kepustakaan. Sedangkan penulisan penelitian lapangan diawali dengan kegiatan penjajakan, untuk mengetahui relevansi antara obyek yang hendak diteliti dengan permasalahan studi ini. Oleh karenanya, penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus (*case study*).

Dalam studi kasus ini, penulis mengadakan telaah secara mendalam tentang pemberdayaan janda yang dilakukan oleh KWT Pelangi Kopi. Dalam studi kasus ini, “kesimpulan hanya berlaku atau terbatas pada kasus tertentu saja”.¹² Studi kasus yang penulis gunakan dikarenakan untuk mengetahui pemberdayaan janda oleh KWT Pelangi Kopi di Desa Giri Mulyo.

Penelitian karya tulis ilmiah ini dilaksanakan di Desa Giri Mulyo Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci dan lebih berpusat pada KWT Pelangi Kopi dalam pemberdayaan janda. Penelitian ini dilakukan sejak bulan

¹¹ Pujiono Pranoto, *Kamus Research*, (Bandung: Angkasa, 1984), h. 120. Lihat juga, Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 87.

¹² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), Cet. Ke-2, h. 207.

Maret sampai dengan bulan Mei 2019. Waktu penulisan itu dapat saja berubah jika hasil penelitian yang didapat belum *valid*.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹³ Data primer ini diperoleh langsung dari responden dan informan. Responden yaitu orang terlibat langsung pada pemberdayaan janda dalam KWT Pelangi Kopi, antara lain: 1) Ketua KWT Pelangi Kopi; dan 2) Anggota KWT Pelangi Kopi. Selanjutnya, Informan yaitu orang yang tidak terlibat langsung pada pemberdayaan janda dalam KWT Pelangi Kopi, antara lain: 1) Kepala Desa Giri Mulyo; 2) Ketua Badan Permusyawaratan Desa¹⁴ (BPD) Desa Giri Mulyo; dan 3) Masyarakat Desa Giri Mulyo. Kedua, data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan KWT Pelangi Kopi.¹⁵

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi penulis gunakan untuk melihat secara langsung ke lapangan guna mengadakan pengamatan terhadap orang-orang yang telah ditentukan sebagai responden dan mencatat data yang diperlukan. Metode ini digunakan untuk mengamati responden secara dekat, yang selanjutnya ditulis dalam lembar observasi. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan janda oleh KWT Pelangi Kopi di Desa Giri Mulyo.

Metode wawancara penulis gunakan untuk mengambil data tentang pandangan ketua dan anggota; KWT Pelangi Kopi, Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Giri Mulyo dan masyarakat Giri Mulyo terhadap pemberdayaan janda yang dilakukan oleh KWT Pelangi Kopi. Data yang diperoleh dari wawancara digunakan untuk mendukung data-data yang penulis dapatkan dengan cara observasi dan dokumentasi.

Metode dokumentasi penulis gunakan untuk melengkapi hasil penelitian dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan sifat benda seperti data tentang letak geografis, nama-nama responden, nama-nama sumber data lapangan dan lain sebagainya. Metode ini digunakan juga untuk mengetahui

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 30.

¹⁴ Selanjutnya Kalimat Badan Permusyawaratan Desa disebut dengan kata BPD saja.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian...*, h. 30.

struktur KWT Pelangi Kopi, profil pengusaha dan usaha kecil selai pelangi, sejarah berdirinya KWT Pelangi Kopi, dan lain sebagainya yang terkait dengan KWT Pelangi Kopi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa teknik yaitu teknik analisis domain, teknik analisis taksonomi, dan teknik analisis komponensial. Teknik analisis domain biasanya digunakan untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang mencakup dalam suatu fokus pokok permasalahan yang tengah diteliti. Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum KWT Pelangi Kopi, untuk menganalisis pola yang digunakan KWT Pelangi Kopi dalam melakukan pemberdayaan janda seperti pendekatan, sosialisasi, nilai-nilai yang ditanamkan kepada anggota serta strategi yang digunakan untuk merekrut anggota KWT Pelangi Kopi.

Teknik analisis taksonomi adalah teknik analisis yang lebih rinci dan mendalam. Pada analisis ini fokus penelitian ditetapkan pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi sasaran penelitian. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data secara lebih terperinci dan lebih mendalam tentang pemberdayaan janda yang dilakukan KWT Pelangi Kopi dalam pengentasan kemiskinan di Desa Giri Mulyo.

Teknik analisis komponensial adalah teknik analisis yang dilakukan setelah penulis mempunyai cukup banyak fakta atau informasi dari hasil observasi dan wawancara yang melacak kontras-kontras di antara warga domain. Analisis ini penulis gunakan untuk menganalisis data implikasi sosial dan ekonomi pemberdayaan janda terhadap anggota KWT Pelangi Kopi secara mendalam. Data itu dianalisis guna mengetahui upaya-upaya untuk menjaga pemberdayaan janda di Giri Mulyo agar tetap berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Pemberdayaan Janda KWT Pelangi Kopi

Adapun yang dimaksud dengan pola adalah pendekatan yang dilakukan terhadap anggota KWT Pelangi Kopi, nilai-nilai yang ditanam kepada anggota

KWT Pelangi Kopi, sosialisasi dalam merekrut anggota KWT Pelangi Kopi, dan strategi pemberdayaan janda oleh KWT Pelangi Kopi.

a. Pendekatan

Pendekatan merupakan cara untuk mendekati sesuatu sehingga *output* dari hal tersebut menghasilkan sikap atau pandangan tentang sesuatu; yang berupa pemikiran atau seperangkat pemikiran yang saling berkaitan. Pendekatan sangat perlukan dalam membentuk suatu kelompok. Dengan pendekatan visi dan misi antar anggota dalam suatu kelompok bisa disatukan.

Pada KWT Pelangi Kopi pendekatan yang digunakan oleh pendiri komunitas tersebut adalah pendekatan profesi. Hal ini berangkat dari masyarakat yang direkrut menjadi anggota KWT Pelangi Kopi. Setiap masyarakat yang direkrut rata-rata mempunyai kebun kopi; ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki kebun kopi, tetapi ia bisa menanam, memelihara dan memetik tanaman. Sehingga semua anggota KWT Pelangi kopi merupakan petani yang saling melengkapi satu sama lain.

Erna Yunita menyatakan:

KWT Pelangi Kopi dibentuk atas dasar anggota sama-sama petani kopi. Hal ini juga yang membuat hubungan antar anggota KWT Pelangi Kopi sampai saat ini masih kompak. Karena setiap anggota memiliki tujuan yang sama yaitu mengegola kopi. Selain itu KWT Pelangi Kopi ketika dibentuk bersamaan dengan adanya program *Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI)* dalam meningkatkan kapasitas petani kopi daerah Kerinci untuk meminimalisir perambahan hutan.¹⁶

b. Nilai-nilai yang ditanam

KWT Pelangi Kopi dalam pelaksanaan program-program kerja mengutamakan nilai kreativitas. Hal ini tercermin ketika kopi sudah berhasil ditanam, diracik hingga siap untuk dijual dalam satu terakhir. Para anggota KWT Pelangi Kopi menghadirkan program-program terbaru seperti membuat “Selai Jeruk Marmalade, Selai Terong Pirus, Selai Raspberry, Selai Strawberry, Selai Bawang Dayak, dan Selai Nanas”.¹⁷

¹⁶ Erna Yunita, Ketua KWT Pelangi Kopi, *Wawancara*, Giri Mulyo, 19 April 2019.

¹⁷ Suwarni, Anggota KWT Pelangi Kopi (berstatus janda), *Wawancara*, Giri Mulyo, 1 Mei 2019.

Nilai kebersamaan juga tidak luput diterapkan dalam KWT Pelangi Kopi. Nilai tersebut terlihat ketika para anggota KWT Pelangi Kopi mengadakan arisan dua minggu satu kali, biasanya bertempat di rumah Erna Yunita –Ketua KWT Pelangi Kopi. Di sinilah para anggota KWT Pelangi Kopi berbagi pengamalan mulai dari menanam, memelihara dan memanenan kopi.

c. Sosialisasi

KWT Pelangi Kopi dibentuk pada tahun 2017 yang bermula pada kesadaran para anggotanya akan potensi yang besar dalam hal komoditi kopi.¹⁸ Hal ini didukung faktor letak geografis Kabupaten Kerinci khususnya Kecamatan Kayu Aro Barat yang berada di wilayah dataran tinggi yang mencapai 1700 Mdpl dengan tanah vulkanik dari Gunung Kerinci (3805 Mdpl) yang sangat cocok bagi syarat hidup tanaman kopi arabika yang berkualitas premium.¹⁹

Dalam pembentukannya menjadi sebuah perkumpulan yang legal dan berbadan hukum, komunitas ini bersama-sama dengan komunitas Alam Korintji²⁰ (Alko) – sebuah komunitas yang terdiri dari 14 kelompok tani, dua di antaranya adalah kelompok wanita tani, salah satunya KWT Pelangi Kopi.²¹

Selain dibantu *Millenium Challenge Account Indonesia* (MCAI) komunitas Alam Korintji (Alko) dibantu juga oleh *Non Government Organization (NGO)*, *World Wide Fund (WWF)*, dan Lembaga Advokasi Hak Rakyat (Lahar). Seiring berjalannya kegiatan-kegiatan yang diadakan komunitas Alko, KWT Pelangi Kopi secara tidak langsung dikenal banyak orang.

d. Strategi Pemberdayaan Janda

Pada awalnya kegiatan KWT Pelangi Kopi terbatas hanya pada pelatihan, pendidikan dan sosialisasi bagi anggota dan penyebarluasan pengetahuan cara bertani kopi. Mulai dari teknik penanaman, perawatan sampai teknik pemanenan sehingga menghasilkan buah kopi atau *red cerry* yang berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian dengan adanya bantuan

¹⁸ Dedi Haryanto, Kepala Desa Giri Mulyo, *Wawancara*, Giri Mulyo, 1 Mei 2019.

¹⁹ Juli, Ketua BPD Desa Giri Mulyo, *Wawancara*, Giri Mulyo, 1 Mei 2019.

²⁰ Selanjutnya Kalimat Alam Korintji disebut dengan kata Alko saja.

²¹ Erna Yunita, Ketua KWT Pelangi Kopi, *Wawancara*, Giri Mulyo, 19 April 2019.

berupa *mini factory* atau pabrik kecil sebagai model industri yang dimiliki secara bersama-sama 14 kelompok tani lainnya, memungkinkan KWT Pelangi Kopi belajar lebih lanjut lagi mengenai *processing* pascapanen tanaman kopi sehingga bisa meningkatkan nilai tambah.

Sesuai yang tertera dalam akta notaris, bahwa dalam perkembangannya kegiatan KWT Pelangi Kopi tidak terbatas hanya komoditas kopi saja. Tetapi telah dikembangkan potensi-potensi lain yang intinya berdampak positif terhadap peningkatan peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga.²² Oleh karena itu, KWT Pelangi Kopi juga mencoba menggali potensi buah lokal dengan membuat produk olahan 5 varian selai buah lokal yaitu Selai Terong Pirus, Selai Jeruk Marmalade (Selai Jeruk dengan Kulit), Selai Strawberry, Selai Raspberry, Selai Bawang Dayak, dan Selai Nanas.

Dengan Brand Selai Pelangi yang menjual sisi keaslian buah tanpa pektin tambahan sehingga persentase buah lebih banyak dari persentase gula, dari bahan baku organik, tanpa zat kimia pengawet, kaya vitamin, dan menyehatkan serta tentunya dengan harga yang terjangkau.²³

Selai kemasan botol (300 Gram) dijual dengan harga Rp. 32.000, meliputi varian Selai Terong Pirus, Selai Jeruk Marmalade, Dan Selai Nanas. Sementara selai varian Selai Raspberry dan Selai Strawberry dijual dengan harga Rp. 34.000. Target pemasaran selai KWT Pelangi Kopi untuk dijual di mini market, para pendaki gunung, konsumen umum, secara online, toko online Alko, pusat oleh-oleh, toko kue, hotel dan restoran untuk pendamping menu sarapan pagi.²⁴

Adapun harga eceran untuk Kopi Arabika Kemasan (100 gram) dengan varian *Full Wash Processed* dijual dengan harga Rp. 35.000. Sementara varian *Natural Processed* dengan harga Rp. 37.000. Adapun harga eceran Kopi Arabika Kemasan (200 gram) dengan varian *Full Wash Processed* dijual dengan Rp. 70.000. Sementara varian *Natural Processed* dengan harga Rp. 74.000. Sedangkan untuk harga kemasan (satu kilogram) varian *Full Wash Processed* dijual dengan harga Rp 345.000. Sedangkan

²² Eva Marlina, Anggota KWT Pelangi Kopi, *Wawancara*, Giri Mulyo, 4 Mei 2019.

²³ Efrina, Anggota KWT Pelangi Kopi, *Wawancara*, Giri Mulyo, 4 Mei 2019.

²⁴ Erna Yunita, *Profil Usaha Kelompok Wanita Tani (KWT) Pelangi Kopi*, (Kerinci: tidak diterbitkan, 2018), h. 2-3.

kemasan (satu kilogram) varian Natural Processed dengan harga Rp. 365.000. Target pemasaran produk Pelangi Coffee adalah pembelian online, toko online Alko, pusat oleh-oleh, *homestay* dan guest house, serta untuk kebutuhan cafe dan warung kopi.²⁵

2. Implikasi Sosial dan Ekonomi Pemberdayaan Janda

1. Sosial

Menurut Atchley kehilangan pasangan, sebagai peristiwa hidup yang signifikan memiliki dampak yang kuat pada sosial dan personal terhadap penyesuaian, kesehatan dan kepuasan kehidupan seseorang.²⁶ Ketika pasangan meninggal korban tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan hilangnya menutup hubungan, tetapi juga untuk mengelola keputusan dan tanggung jawab sehari-hari yang dulunya dikelola bersama. Menjanda dapat dianggap sebagai posisi baru yang melibatkan perubahan besar dalam diri perempuan baik peran dalam tujuan keluarga ataupun dalam masyarakat.

2. Ekonomi

Pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh suatu negara adalah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya. Pada negara yang sedang berkembang umumnya berusaha untuk mengembangkan diri dari masyarakat yang sifatnya tradisional dimana dalam kondisi yang masih terbelakang menuju ke arah yang lebih baik dan maju. Kalau ini dikaitkan dengan masalah ekonomi maka hal ini ditujukan ke arah mendapatkan tingkat kesejahteraan dan ekonomi yang lebih baik.²⁷ Salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara atau pemerintah adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin karena pada hakikatnya suatu pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Tingginya tingkat kemiskinan menjadi indikator bahwa masyarakat belum berperan menjadi subjek dalam pembangunan. Menjadi subjek dalam pembangunan adalah memberikan hak-haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan dan produksi nasional. Untuk sampai pada tujuan tersebut

²⁵ Erna Yunita, *Profil Usaha Kelompok...*, h. 3.

²⁶ Mehta, et. all., "Effect of Widowness on Repression-Sensitisation Tendency, *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, Vol. 1, No. 3, 2006, h. 41.

²⁷ Putriana, "Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)", Vol. 15, No. 2, 2014, h. 117.

rakyat harus memiliki modal material dan mental. Hal ini yang menjadi inspirasi untuk perlunya pemberdayaan ekonomi rakyat yang kemudian berkembang untuk membangun sistem perekonomian bercorak ekonomi kerakyatan.²⁸ KWT Pelangi Kopi merupakan komunitas yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Komunitas ini mengutamakan pemberdayaan perempuan yang berstatus sebagai janda.

Surtini mengatakan KWT Pelangi Kopi menyediakan pekerjaan sebagai pemotik kopi yang diberikan upah sebesar Rp. 55.000 per hari dengan durasi kerja dari jam 7 pagi sampai 12 siang.²⁹ Apabila para petani sanggup bekerja dalam seminggu 4 hari saja, maka dalam satu bulan dapat menghasilkan Rp. 880.000 per bulan. Jika diukur dengan berpatokan pada ukuran kemiskinan bank dunia yaitu sebesar Rp. 401.220 per kapita satu bulan atau sama dengan Rp. 13.374 per hari, maka penghasilan para petani kopi sudah di atas garis kemiskinan.

Kepala Badan Pusat Statistik³⁰ (BPS) Suharyanto mengatakan:

Hitung-hitungannya bukan dengan membagi pendapatan Rp. 401.220 per bulan menjadi Rp. 13.374 per hari. Ada faktor lain yang perlu diperhatikan, yakni jumlah anggota keluarga. Kalau dibagi 30 hari, saya rasa tidak relevan. Saya sarankan dikalikan anggota rumah tangga. Kan yang dibutuhkan per rumah tangga. Biasanya, keluarga miskin memiliki anak lebih banyak. BPS mendapat angka 4,5 rata-rata anggota keluarga. Jadi, pendapatan perkapita per bulan tersebut dikalikan dengan 4,5. Didapatkan hasil Rp 1,8 juta. Nilai tersebut masih di bawah upah minimum sehingga termasuk dalam kategori miskin.³¹

Berdasarkan pernyataan di atas penghasilan yang diperoleh para petani belum dapat menutupi kebutuhan sehari-hari. Kalau mengandalkan hasil dari memotik kopi saja. Oleh karena itu, diperlukan penghasilan tambahan melalui kopi yang diracik dalam kemasan. "Endang Wahyuni mengatakan dalam satu bulan KWT Pelangi Kopi dapat memproduksi 150 bungkus Kopi Arabika kemasan 200 gram dan kemasan 100 gram varian *Full Wash Processed* dan *Natural Processe*".³²

²⁸ Putriana, "Strategi Penanggulangan Kemiskinan...", h. 118.

²⁹ Surtini, Petani Kopi (berstatus janda), *Wawancara*, Giri Mulyo, 4 Mei 2019.

³⁰ Selanjutnya Kalimat Badan Pusat Statistik disebut dengan kata BPS saja.

³¹ Kompas.com, *Begini Hitung-hitungan Angka Kemiskinan di Indonesia Cara BPS*, (Online), (<https://ekonomi.kompas.com>, diakses pada 3 Mei 2019).

³² Endang Wahyuni, Anggota KWT Pelangi Kopi, *Wawancara*, Giri Mulyo, 4 Mei 2019.

Jika setiap anggota KWT Pelangi Kopi mendapat bagian 2 kg – misalnya, varian *Full Wash Processed*– dari hasil produksi dalam satu bulan, kemudian dijual, maka akan diperoleh hasil sebanyak Rp. 690.000. Selain itu anggota KWT Pelangi Kopi bisa juga memperoleh penghasilan tambahan dari selai yang dibuat dari buah-buahan yang ditanam disela-sela kopi –Selai Jeruk Marmalade, Selai Terong Pirus, Selai Raspberry, Selai Strawberry, Selai Bawang Dayak, dan Selai Nanas.

Erni Marlina mengatakan dalam satu bulan KWT Pelangi Kopi dapat memproduksi 500 Botol selai buah kemasan 300 gram yang meliputi semua varian –Selai Jeruk Marmalade, Selai Terong Pirus, Selai Raspberry, Selai Strawberry, Selai Bawang Dayak, dan Selai Nanas.³³ Jika setiap anggota KWT Pelangi Kopi mendapat bagian 30 botol –misalnya, varian Selai Jeruk Marmalade– dari hasil produksi dalam satu bulan, kemudian dijual, maka akan diperoleh hasil sebanyak Rp. 640.000. Apabila semua program KWT Pelangi Kopi dijalankan dengan berkelanjutan, maka akan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari petani kopi di Desa Giri Mulyo.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

KWT Pelangi Kopi merupakan komunitas yang beranggotakan petani kopi wanita dan dibentuk bermula dari kesadaran para anggotanya akan potensi yang besar dalam hal komoditi kopi di Desa Giri Mulyo. Komunitas ini mempunyai target untuk mengentaskan kemiskinan dengan pemberdayaan perempuan yang mengutamakan anggota dan masyarakat yang berstatus janda. KWT Petani Kopi menawarkan beberapa program yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Diantaranya, Kopi Arabika Kemasan dengan varian *Full Wash Processed* dan *Natural Processed*. Selain itu, KWT Pelangi Kopi juga menawarkan Selai Terong Pirus, Selai Jeruk Marmalade (Selai Jeruk dengan Kulit), Selai Strawberry, Selai Raspberry, Selai Bawang Dayak, dan Selai Nanas. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat Desa Giri Mulyo untuk mengentaskan kemiskinan.

2. Saran

³³ Erni Marlina, Anggota KWT Pelangi Kopi (berstatus janda), Giri Mulyo, 4 Mei 2019.

Kepekaan terhadap kebutuhan hidup janda harus ditingkatkan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Terlebih lagi janda tersebut memiliki beberapa anak. Oleh sebab itu, jika janda tidak diperhatikan maka kemiskinan akan bisa turun-temurun terhadap anak yang ditinggalkan. Terlebih lagi bisa menjadi bencana bagi bangsa Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus membantu dari segi dana maupun motivasi untuk KWT Pelangi Kopi agar dapat dengan mudah melakukan setiap kegiatan maupun pengembangan program kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin Pada September 2018 Sebesar 9,66 Persen*, (Online), (<https://www.bps.go.id/>, diakses pada 10 Februari 2019).
- Harian Nasional, *Mengenal Kopi Kerinci, Kopi Terbaik se-Indonesia*, (Online), (<http://harnas.co/>, diakses pada 10 Februari 2019).
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada, Cet. Ke-2.
- Kartodirjo, Sartono, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kerincitime.co.id, *Angka Kemiskinan di Kerinci Turun 4,7 Persen*, (Online), (<https://kerincitime.co.id/>, diakses pada 10 Februari 2019).
- Kompas.com, Begini Hitung-hitungan Angka Kemiskinan di Indonesia Cara BPS, (Online), (<https://ekonomi.kompas.com>, diakses pada 3 Mei 2019).
- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
- Mehta, et. all., 2006, "Effect of Widowness on Repression-Sensitisation Tendency, *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, Vol. 1, No. 3.
- Pranoto, Pujiono, 1984, *Kamus Research*, Bandung: Angkasa.
- Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), 2017, *Laporan Tahunan 2017*, Jakarta: t.p.
- Putri, Oktaviani Nindya, ddk., 2015, "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga", *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 2, No. 2

Putriana, 2012, "Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)", Vol. 15, No. 2.

Setianingrum, Margaretta Erna dan Ratriana Yuliastuti Endang Kusumiati, "Quality of Life Janda Lanjut Usia yang Tinggal di Pedesaan", *Prosiding Temui Ilmiah X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia*, Semarang: 22-24 Agustus 2017.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Wawancara

Dedi Haryanto, Kepala Desa Giri Mulyo, *Wawancara*, Giri Mulyo, 1 Mei 2019.

Efrina, Anggota KWT Pelangi Kopi, *Wawancara*, Giri Mulyo, 4 Mei 2019.

Endang Wahyuni, Anggota KWT Pelangi Kopi, *Wawancara*, Giri Mulyo, 4 Mei 2019.

Erna Yunita, Ketua KWT Pelangi Kopi, *Wawancara*, Giri Mulyo, 19 April 2019.

Erni Marlina, Anggota KWT Pelangi Kopi (berstatus janda), Giri Mulyo, 4 Mei 2019.

Eva Marlina, Anggota KWT Pelangi Kopi, *Wawancara*, Giri Mulyo, 4 Mei 2019.

Juli, Ketua BPD Desa Giri Mulyo, *Wawancara*, Giri Mulyo, 1 Mei 2019.

Surtini, Petani Kopi (berstatus janda), *Wawancara*, Giri Mulyo, 4 Mei 2019.

Suwarni, Anggota KWT Pelangi Kopi (berstatus janda), *Wawancara*, Giri Mulyo, 1 Mei 2019.

Strategi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Wisata Pantai Di Kawasan Lombok Timur

Novia Suhastini

noviasuhastini@uinmataram.ac.id

Abstract: *The development of tourism which has recently been highlighted by the mass media in Indonesia with the government's program in tourism development as an addition to foreign exchange from the non-oil and gas sector. The tourism development program, which has been launched since 1988, is expected to attract the presence of foreign tourists and domestic tourists, which in turn will benefit the country's financial income. The exoticism of the beach has become one of the tourist strengths of East Lombok Regency. Along the coast in the south eastern Lombok region, lined with very attractive beaches. The development of attractions that are constrained by infrastructure, especially the problem is the lack of electricity and roads for access to locations are inadequate. The problem solving, it takes a policy of analyzing tourism policies in East Lombok Regency must pay attention; policy alternatif, Policy implementation and policy evaluation.*

[Pengembangan pariwisata yang akhir-akhir ini banyak disoroti oleh media massa di Indonesia adalah sejalan dengan program pemerintah dalam pengembangan pariwisata sebagai penambah devisa negara diluar sektor nonmigas. Program pengembangan pariwisata yang dicanangkan sejak tahun 1988, diharapkan menarik kehadiran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan bagi pemasukan keuangan Negara. Eksotisme alam pantai menjadi salah satu andalan wisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Terbilang di sepanjang pantai di kawasan Lombok timur bagian selatan, berjejer pantai-pantai yang sangat menarik. Hanya saja, pengembangan obyek wisata itu terkendala infrastruktur, terlebih yang menjadi permasalahan adalah belum meratanya listrik dan jalan raya untuk akses ke lokasi belum memadai. Dalam penyelesaian permasalahan, dibutuhkan sebuah kebijakan pem analisis kebijakan pariwisata di Kabupaten Lombok Timur harus memperhatikan; alternatif kebijakan, Implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.]

Kata Kunci: *Strategi Kebijakan, Pembangunan Berkelanjutan*

A. Pendahuluan

Pariwisata berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu "Pari" dan "Wisata", Pari berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang

dilakukan berulang-ulang atau berkali-kali¹. Proses bepergian ini dapat menyebabkan terjadinya interaksi, dan hubungan-hubungan, kepuasan, kenikmatan dan lain-lain diantara sesama, pribadi atau antar kelompok².

Pengembangan pariwisata yang akhir-akhir ini banyak disoroti oleh media massa di Indonesia adalah sejalan dengan program pemerintah dalam menggalakkan pariwisata sebagai penambah devisa negara diluar sektor nonmigas. Program pengembangan pariwisata yang dicanangkan sejak tahun 1988, diharapkan menarik kehadiran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan bagi pemasukan keuangan Negara³, peranan pariwisata dalam pembangunan Negara pada garis besarnya berintikan tiga segi yakni segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita pada wisatawan)⁴. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur merata secara material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai suatu proses perubahan berkesinambungan, terjadi secara terus menerus yang melibatkan semua unsur di dalamnya, yaitu pemerintah pusat ataupun daerah dan masyarakat serta dunia usaha. Kebijakan diperlukan bagi suatu organisasi yang di sebut dengan Negara, ketika Negara itu terbentuk maka Negara bersangkutan melalui konstitusi mengatur tata kehidupan pemerintah, Negara dan Publik⁵.

¹ Andayani S, dkk. Jurnal Rekayasa Sipil (*Pengembangan Kawasan Wisata Balekambang Kabupaten Malang*), Volume 6, No. 2-2012 ISSN 1978-5658.

² Irianto. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan (*Dampak Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Gili Trawanagna Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara*). Vol.7 No.3 November 2011.

³ Prasetyo P, Jurnal Ilmu Pemerintahan, (*Strategi Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Kota Tarakan*), 2013, 1 (1): 151-164.

⁴ Wiryawan I.W.G. Jurnal Advokasi (*Paradoks Kebijakan Industrialisasi Pariwisata Dengan Perlindungan Terhadap Upah Pekerja di Bidang Kepariwisataan di Provinsi Bali*). Vol.3 No.1 April 2013.

⁵ Suratmi, Santosa S., Manajemen Bisnis Syariah (*Strategi Pemerintah Kota Surakarta dalam Melakukan City Branding Sebagai Kota Budaya*). No. 2/Th.VI/ Februari 2013.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 Tentan Kepariwisataan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Eksotisme alam pantai menjadi salah satu andalan wisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Terbilang di sepanjang pantai di kawasan Lotim bagian selatan, berjejer pantai-pantai yang sangat menarik. Hanya saja, pengembangan obyek wisata itu terkendala infrastruktur, terlebih yang menjadi permasalahan adalah belum meratanya listrik dan jalan raya untuk akses ke lokasi belum memadai. Pengembangan pariwisata memiliki karakter aktivitas yang bersifat multisectoral, dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata harus terencana secara terpadu dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan fisik dan politik⁶.

Secara ekologis, kawasan pesisir sangat kompleks dan mempunyai nilai sumberdaya alam yang tinggi. Kegiatan wisata dan perikanan memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pendapatan baik masyarakat maupun pemerintah daerah setempat apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Salah satu yang diakui adalah pantai Surga Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru. Kondisi jalan menuju pantai indah dan menawan ini masih terlihat hancur. Dari jalan utama menuju pantai hanya berupa jalan tanah yang belum tersentuh program pengerasan ataupun pengaspalan tanah dari pemerintah.

Landasan Teori

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia,

⁶ Prayogi P.A. Jurnal Perhotelan dan Pariwisata (*Dampak Perkembangan Pariwisata di Objek Wisata Penglipuran*), Vol.1 No.1, Agustus 2011.

berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan⁷.

Adapun yang menjadi permasalahan disini adalah kesulitan pemerintah untuk membangun infrastruktur pada kawasan wisata pantai di Lombok Timur. Berdasarkan permasalahan ini maka alternatif apa yang bisa diterapkan supaya pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa adanya ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah setempat?

Metode Yang Digunakan

Adapun metode yang digunakan dalam analisa kebijakan dalam pembangunan berkelanjutan wisata pantai di kawasan Lombok Timur adalah pendekatan bottom-up. Dalam kebijakan yang ditawarkan di atas dapat kita lihat bagaimana supaya ada timbal balik dari kebijakan tersebut yaitu masyarakat mendapatkan manfaat dari pengelolaan tempat wisata dengan membuka akses ekonomi yang lebih baik dan demikian juga dengan pemerintah daerah yaitu dapat menambah pendapatan daerah melalui sektor wisata, khususnya wisata pantai ini.

B. Pembahasan

1. Alternatif Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan Pada Kawasan Wisata Pantai di Lombok Timur.

Adapun alternatif kebijakan yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Sosialisasi Dengan Masyarakat

Dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, memberikan pemahaman tentang dampak dari wisata yang mampu memberikan mereka pendapatan baru dengan adanya kesempatan untuk membuka usaha (misalnya dengan berdagang, dll). Pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat perlu dipertimbangkan pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam kegiatan pembangunan pariwisata⁸.

⁷ Anggraeni R., dkk. Jurnal Administrasi Publik (*Evaluasi Kebijakan Publik “Evaluasi Terhadap Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang*). Vol.1, No.1: 2013

⁸ Masyarakat diberi kesempatan berperan penting dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka, dalam hal konsep ini mensyaratkan adanya pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik dan

Analisa:

- a) Substantive: dalam hal ini, sangat bagus untuk membuka pemahaman masyarakat akan dampak dari wisata, khususnya wisata pantai yang ada di daerah Kabupaten Lombok Timur bagian Selatan.
- b) Politik: dari segi politik dapat memberikan dampak pada pemerintah dan masyarakat yaitu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan warga sekitar.
- c) Sosial: dalam hal ini, diskusi sosialisasi dan diskusi dengan masyarakat untuk menyatukan pemikiran antara keinginan masyarakat dengan pemerintah, sehingga masyarakat merasa diperhatikan.
- d) Teknis: dari segi teknis, tidak terlalu sulit kecuali pihak-pihak yang bersikeras tidak menginginkan adanya pembangunan infrastruktur. Tetapi apabila dilakukan dengan cara musyawarah semuanya akan berjalan lancar.
- e) Hukum: dari segi hukumnya akan lebih efektif karena semua keputusan timbul atas dasar keputusan bersama pemerintah dan masyarakat.
- f) Ekonomi: secara ekonomi, dengan cara sosialisasi akan lebih efisien dari segi pengeluaran daerah.
- g) Ketika kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah telah terjalin maka kita dapat memberikan alternatif kebijakan yang selanjutnya, yaitu:

b. Pembangunan Infrastruktur

Setelah adanya kesepakatan antara pihak masyarakat dengan pemerintah, kita bisa melakukan alternatif yang kedua yaitu membangun infrastruktur pada kawasan wisata pantai, yang menjadi prioritas utama adalah infrastruktur jalan.

Analisa:

- a) Substantive: dalam hal ini, alternatif kebijakan pembangunan infrastruktur akan berdampak bagus untuk akses pengunjung ke lokasi wisata.

keunikannya untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, (Pendekatan Masyarakat Untuk Perencanaan Pariwisata Sangiran: Integrasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Pelestarian Situs) Jurnal Sangiran No.1 Tahun 2012.

- b) Politik: dari segi politik pemerintah harus lebih dominan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- c) Sosial: dilihat dari segi sosial, masyarakat setempat akan mulai merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur dengan akses yang lebih cepat ke lokasi wisata dengan infrastruktur yang lebih bagus di kawasan tempat mereka tinggal.
- d) Teknis: dalam hal teknis memang membutuhkan waktu yang sedikit lama dalam pembangunan infrastruktur, tergantung dari anggaran yang disediakan oleh Pemkab Lotim. Apabila pemerintah memberikan dana yang sesuai maka pembangunannya akan cepat selesai.
- e) Hukum: dari segi hukum karena adanya kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah, jadi untuk pelaksanaannya tidak ada halangan dari segi hukum.
- f) Ekonomi: memang kalau dari segi ekonomi tentunya akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit berhubung pantai di kawasan Lombok Timur bagian selatan cukup banyak, sehingga untuk pembangunan infrastruktur cukup banyak membutuhkan dana dari pemerintah.

c. Pengelolaan Daerah Wisata

Apabila infrastruktur sudah terbangun maka langkah selanjutnya adalah memberikan alternatif kebijakan dengan mengelola tempat wisata tentunya tidak lepas dari peranserta masyarakat sekitar. Jadi pemerintah bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut bergabung kedalamnya dalam hal pengelolaan wisata. Adapun tujuan mengikutsertakan masyarakat setempat adalah untuk menghindari konflik atau ketegangan antar masyarakat dengan pemerintah. Setelah itu pemerintah dapat menarik infestor asing untuk masuk kedalamnya, dengan tujuan bisa menambah penghasilan daerah, seperti yang termaktub dalam pasal 10 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang pariwisata yaitu dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tidak hanya itu, akan tetapi ini sekaligus bisa menjadi promosi wisata pantai yang ada di kawasan Lombok Timur

(tepatnya Lombok Timur bagian Selatan) dengan adanya kerjasama dengan investor asing.

Analisa:

- a) Substantive: hal ini dirasa sangat bagus apalagi dapat menarik infestor asing masuk kedalamnya.
- b) Politik: dari segi politik dapat berdampak baik, dapat menghubungkan pemerintah dengan masyarakat setempat dan kemudian adanya kerjasama dengan infestor asing.
- c) Sosial: dari segi sosial maka akan terjadi perubahan sosial pada masyarakat sekitar dengan adanya wisata ini. Yang dimana sebelumnya daerahnya belum dikenal, maka disini diketahui oleh banyak daerah bahkan mancanegara.
- d) Teknis: memang dari segi teknis agak sulit mendatangkan investor, tapi satu cara yang bisa dilakukan yaitu membenahi infrastruktur dan promosi wisata maka disinalah infestor akan mulai masuk.
- e) Hukum: dari segi hukumnya sangat bagus apabila pengelolaannya mengikutsertakan masyarakat sekitar lokasi wisata.
- f) Ekonomi: dari sisi ekonomi sangat bagus, selain dapat menambah penghasilan warga sekitar dengan adanya pekerjaan baru bagi mereka, ini juga berdmpak kepada daerah yaitu pendapatan daerah semakin meningkat.

2. Tabel Fisibilitas Alternatif Kebijakan

NO	ALTERNATIF	INDIKATOR (1-10 best)						
		SUBs	TEKNIS	EKONOMI	SOSIAL	POLITIK	HUKUM	TOTAL
1	SOSIALISASI	8	7	8	8	8	9	47
2	INFRASTRUKTUR	8	6	7	8	9	9	46
3	PENGELOLAAN	8	7	9	9	9	9	48

Tabel 1: Sekor Alternatif Kebijakan

Keterangan: 1-4 = visibilitas alternatif rendah

4-7 = visibilitas alternatif sedang

7-10 = visibilitas alternatif tinggi

Ketiga alternatif bisa diterapkan dan sangat bagus untuk tahapan-tahapan pembangunan daerah wisata, terutama daerah-daerah wisata yang di dalamnya ada ketegangan antara pemerintah dengan masyarakat. Akan tetapi alternatif

yang bagus untuk diterapkan ketika pemerintah dan masyarakat memiliki komitmen yang sama maka langkah yang efektif ketika anggaran dana untuk pembangunan infrastruktur adalah alternative ketiga yaitu pengelolaan yang bagus, apalagi bisa mendatangkan infestor asing untuk masuk di dalamnya.

Dalam tabel fisibilitas *alternative kebijakan* dari penilaian indikator penilaian yang digunakan mulai dari 1-4 visibilitas alternatif rendah, 4-7 alternatif sedang, dan 7-10 alternatif tinggi. Adapun alternatif yang memiliki nilai indikator tertinggi adalah alternatif pengelolaan, dalam hal ini yang menjadi alasan mendasar mengapa mengapa pengelolaan menjadi alternative yang memiliki nilai indikator tertinggi? Karena apabila pengelolaan dilakukan dengan baik maka semua persoalan dapat diselasaikan dengan baik sesuai keinginan. Tentunya semua ini bisa berjalan apabila pemerintah bisa bekerjasama dengan masyarakat. Hal yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mampu untuk meyakinkan masyarakat bahwa dengan adanya wisata pantai ini berdampak positif bagi masyarakat untuk mendongkar pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menambah pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Dan inti dari semua tawaran kebijakan di atas adalah bagaimana membudayakan dan memberdayakan masyarakat sekitar dengan melakukan pendekatan-pendekatan kultural baik berbentuk sosiologi, antropologis dan lain-lain. Adapun pemberdayaan itu mengandung dua arti, *pertama* memindahkan kekuasaan dari pemerintah kemasyarakatan maksudnya tidak mesti sepenuhnya dilimpahkan kepada masyarakat tetapi kontrol dari pemerintah tetap ada supaya masyarakat merasa memiliki. *Kedua*, memotivasi masyarakat sehingga produktifitasnya meningkat, sehingga masyarakat mampu meningkatkan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

3. Pengembangan Alternatif Kebijakan

a) Goals

Dalam hal ini adapun tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk memajukan wisata Lombok, khususnya wisata pantai kawasan Lombok Timur (bagian Selatan). Dan menghasilkan dampak yang baik bagi daerah tentunya dengan tujuan memajukan daerah dan memberdayakan

masyarakat sekitar kawasan wisata khususnya dan masyarakat Lombok secara luas.

b) Target Groups

Target disini yaitu masyarakat dan pemerintah, tentunya dengan pengembangan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh pulau Lombok guna untuk mengembangkan daerah, dan tentunya sesuai dengan tujuan dari kepariwisataan itu sendiri yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, kemudian memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antarbangsa.

3) Agen

Agen disini adalah masyarakat dan para perwakilan dari pemerintah yang berfungsi untuk mengurus kelangsungan pembangunan maupun pengelolaan daerah wisata pantai di kawasan Lombok Timur bagian Selatan.

4) Struktur implementasi

Di sini yang memiliki peran penting dan tanggung jawab yang besar adalah pemerintah dan tokoh masyarakat daerah setempat.

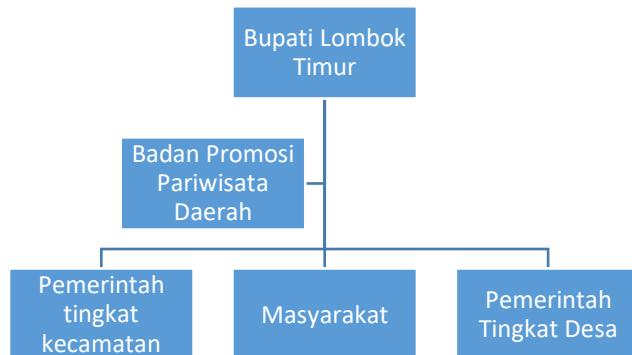


Diagram 1: Struktur Implementasi Kebijakan

5) Assumptions

Apabila semua alternatif kebijakan ini dijalakan sesuai dengan prosedur hukum maka besar harapan tidak terjadi benturan antara masyarakat dengan pemerintah, malah sebaliknya masyarakat mendukung program pemerintah apabila tidak bertentangan dengan norma-norma adat yang

berlaku. Tentunya pemerintah harus bisa ambil posisi dengan mempertimbangkan Norma adat dan kesepakatan bersama.

6) Rules

Adapun kebijakan tersbut dipandang sebagai kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang dilatar belakangi sesuai dengan Kultur masyarakat dan dapat memberikan dampak yang positif bagi daerah dan masyarakat tentunya. Kemudian pemerintah menjalankan fungsi pengasannya dan masyarakat mendukung program pemerintah.

4. Policy Implementation

1. Analisis Konten dan Konteks Kebijakan

a. Konten Kebijakan:

1) *Interest Affected*

Dalam penerapan kebijakan ini sangat mudah untuk mengakses segala hal yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata karena dengan keterlibatan masyarakat didalamnya memungkinkan akan menumbuhkan rasa kepemilikan oleh masyarakat sehingga mereka merasa berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi perkembangan wisata (kuhusnya wisata pantai).

2) *Type of Benefits*

Adapun dampak yang bisa terlihat dari penerapan kebijakan ini adalah dapat terlihat bagaimana menciptakan masyarakat yang mandiri dengan mengembangkan usaha-usaha mikro di kawasan wisata, sehingga mampu mendongkrak laju ekonomi masyarakat akan meningkat sehingga pengelolaan akan semakin mudah dijalakan karena apabila masyarakat merasakan dampak positif dari pembangunan infrastruktur wisata pantai, tidak hanya itu anggaran pendapatan daerah melalui sektor wisata juga akan bertambah.

3) *Extent of Change Envisioned*

Kebijakan ini di implementasikan di daerah wisata yang menjadi sasaran adalah masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya kebijakan, tetapi pemerintah tidak serta merta

melimpahkannya kepada masyarakat, jadi pemerintah harus tetap menjalankan fungsinya pengawasannya supaya ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang berakibat masyarakat akan mendukung pemerintah untuk mengembangkan daerah wisata yang memiliki daya Tarik terhadap wisatawan.

4) *Site of Decision Making*

Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai agen kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat memberikan ruang yang terbuka untuk masyarakat dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kebijakan atau permasalahan dalam masyarakat sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah. Jadi ketika masyarakat diberikan kepercayaan oleh pemerintah daerah maka masyarakat merasa tidak tertekan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, terkecuali hal-hal sifatnya structural dan lebih keteknis pemerintah harus lebih dominan memberikan arahan kepada masyarakat.

5) *Program Implementors*

Implementasi program ini disusun secara struktur yang melibatkan: Bupati dengan melimpahkan wewenang kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) kemudian bekerjasama dengan pemerintah tingkat kecamatan, pemerintah Desa serta musyawarah dengan masyarakat untuk menyusun program pembangunan infra struktur wisata pantai sehingga tersusun tim pelaksana dan tim pengawas pelaksanaan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang diadopsi dilaksanakan oleh unit-unit administrative tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada⁹.

⁹ Mouw E. Jurnal UNIERA (*Implementasi Kebijakan Program Festival Teluk Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat*), Vol.3 No.1; ISSN 2086-0404, februari 2014.

6) *Resources Committed*

Pengadaan alat pembangunan infrastruktur menggunakan dana APBD yang dianggarkan setiap tahunnya untuk pengembangan daerah. Selain itu ditunjang oleh sumberdaya yang ada dalam masyarakat untuk terus berupaya mengembangkan potensi yang ada sehingga akan memperlancar pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

2. Konteks Kebijakan

1) *Power, Interests, and Strategies Actors Involved*

Stakeholder/ Pemangku kepentingan adalah Bupati Lombok Timur yang memberikan wewenang kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai perancang dan pembenduk kebijakan berserata pemerintah tingkat Kecamatan, pemerintah Desa dan untuk ranah publik adanya peran Masyarakat di dalamnya. Dalam hal ini kemudian DPRD menjalankan pungsingsinya untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur wisata yang sekaligus menentukan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka membangun infrastrukrur wisata. Dan kemudian untuk pelaksanaan dan pengadaan barang pemerintah memberikan kepada tender pemenang, ketika pemenang tender ditentukan oleh pemerintah maka pemerintahlah yang harus lebih banyak mengontrol jalannya pelaksanaan pembangunan infrastruktur wisata, tetapi apa bila pelaksanaannya pembangunan di kerjakan oleh swasta maka swasta harus bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan untuk menyelesaikan kontrak pelaksanaan pembangunan infrastruktur wisata ini.

2) *Institutions and Regime Characteristic*

Dilihat dari segi birokrasi pemerintahan Kabupaten Lombok Timur lebih bersifat demokratis dan terbuka sehingga memudahkan akses antara hubungan pemerintah dengan masyarakat, dengan tujuan supaya masyarakat bisa memberikan informasi dan kontribusi yang besar terhadap

pemerintah untuk mengembangkan daerah dengan mempertahankan kearifan lokal baik budaya dan tradisi yang sudah hidup dalam masyarakat. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menyediakan lapangan pekerjaan dan menciptakan pendapatan, sedangkan masyarakat (*society*) berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas produktif dan pemberdayaan masyarakat¹⁰.

3) *Compliance and Responsiveness*

Dari segi birokrasi, dengan ketegasan yang ditunjukkan oleh Bupati Lombok Timur akan berdampak terhadap birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Selain itu antosiasi masyarakat yang mendukung pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mulai sadar dengan dilakukannya sosialisasi akan danfak positif dari pengembangan wisata.

2. Faktor-Faktor Yang Dipersiapkan (*Enabling Conditions*)

a. *Pendekatan Sosial*

Pendekatan sosial dilakukan dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaa pembangunan infrastruktur wisata, baik itu di tingkat pemerintah maupun masyarakat sehingga mempermudah untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya.

b. *Komitmen Agen Pelaksana*

Komitmen dari pelaksana adalah dasar dari kelancaran program yang direncanakan, sehingga ketika agen memiliki komitmen yang tinggi maka diyakini bahwa pelaksanaan kebijakan akan berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaann yang sudah ditentukan.

¹⁰ Suratmi, Santosa S., Manajemen Bisnis Syariah (*Strategi Pemerintah Kota Surakarta dalam Melakukan City Branding Sebagai Kota Budaya*). No. 2/Th.VI/ Februari 2013.

4. Policy Evaluation

Pembangunan berkelanjutan pada sektor pariwisata mendapatkan perhatian yang cukup luas dari berbagai kalangan, pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diartikan sebagai aktivitas pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak saat ini. Untuk kemajuan pariwisata maka diperlukan sistem pemasaran yang baik, strategi pemasaran destinasi wisata berkelanjutan (*sustainable tourism destination marking strategy*): (1) tahap identifikasi (*identification*), (2) tahap formulasi strategi (*formulation*), (3) tahap implementasi dari strategi dimaksud (*implementation*), (4) tahap monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai (*monitoring and evaluation*), (Suradnya: 2011). Inti dari pembangun pariwisata berkelanjutan adalah sistem monitoring dan evaluasi.

1. Monitoring

Untuk kelancaran program monitoring dilakukan setiap bulannya, ini bertujuan untuk terus melihat perkembangan dari pelaksanaan kebijakan yang diterapkan sehingga dapat mengukur perkembangan yang dihasilkan oleh kebijakan terhadap kemajuan daerah. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yg ditetapkan) secara sistematis dan kontinyu tentang kegiatan program/proyek sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/proyek itu selanjutnya.

Monitoring dapat didefinisikan sebagai fungsi manajemen untuk membimbing dalam arah yang dituju dan untuk memeriksa kinerja terhadap pra-rencana ditentukan. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dari aktivitas yang sedang dikerjakan. Atau dapat juga dikatakan monitoring yaitu proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program atau proyek sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program atau proyek itu selanjutnya¹¹.

2. Evaluasi

¹¹ <http://pramitasarah.wordpress.com/2010/11/28/monitoring>, di akses pada tgl 17/12/2014

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.¹²

C. Simpulan

Dalam perencanaan kebijakan hingga implementasi kebijakan di lapangan hendaknya mengikutsertakan masyarakat di dalamnya, mulai dari pengambilan keputusan kebijakan. Karena program yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik apabila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kultur, budaya tidak diperhatikan dalam pembentukan kebijakan. Kemudian system kontrol dari pemerintah harus berjalan baik dari segi pengawasan hingga pengelolaan objek wisata guna menjaga kelangsungan pengembangan wisata terutama wisata pantai yang ada di kawasan Lombok Timur khususnya bagian Selatan. Sehingga dengan diterapkannya kebijakan yang baik maka keberlangsungan pengelolaan berkelanjutan pariwisata akan lebih mudah untuk dilakukan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang & Peraturan daerah:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur.

¹² <http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id>, di akses pada tgl 17/12/2014

Jurnal:

Andayani S, dkk. Jurnal Rekayasa Sipil (*Pengembangan Kawasan Wisata Balekambang Kabupaten Malang*), Volume 6, No. 2-2012 ISSN 1978-5658.

Anggraeni R., dkk. Jurnal Administrasi Publik (*Evaluasi Kebijakan Publik “Evaluasi Terhadap Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang*). Vol.1, No.1: 2013

Irianto. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan (*Dampak Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Gili Trawanagna Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara*). Vol.7 No.3 November 2011.

Mouw E. Jurnal UNIERA (*Implementasi Kebijakan Program Festival Teluk Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat*), Vol.3 No.1; ISSN 2086-0404, februari 2014.

Panglipur R.S (*Pendekatan Masyarakat Untuk Perencanaan Pariwisata Sangiran: Integrasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Pelestarian Situs*) Jurnal Sangiran No.1 Tahun 2012.

Parma, I.P.G, (*Kajian Perencanaan Penataan Daya Tarik Wisata Pelabuhan Buleleng*), vol.10, No.2 Desember 2011 ISSN 1412-8683.

Prasetyo P, Jurnal Ilmu Pemerintahan, (*Strategi Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Kota Tarakan*), 2013, 1 (1): 151-164.

Prayogi P.A. Jurnal Perhotelan dan Pariwisata (*Dampak Perkembangan Pariwisata di Objek Wisata Penglipuran*), Vol.1 No.1, Agustus 2011.

Suradnya I.M, JURNAL Ilmiah Manajemen & Akuntansi STIE Triatma Mulya (Strategi pemasaran Destinasi Pariwisata Berkelanjutan), Vol 16, No.2 Edisi Desember 2011.

Suratmi, Santosa S., Manajemen Bisnis Syariah (*Strategi Pemerintah Kota Surakarta dalam Melakukan City Branding Sebagai Kota Budaya*). No. 2/Th.VI/ Februari 2013.

Wiryawan I.W.G. Jurnal Advokasi (*Paradoks Kebijakan Industrialisasi Pariwisata Dengan Perlindungan Terhadap Upah Pekerja di Bidang Kepariwisataan di Provinsi Bali*). Vol.3 No.1 April 2013.

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Vol. 10, No. 2, Desember 2019

BATIK GEBLEK RENTENG KULON PROGO : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hak Cipta Produk Lokal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

Rahadiyand Aditiya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

rahadiyand_aditiya@yahoo.co.id

Abstract:

HAKI is a wealth of all the products of the production of intelligence, such as technology, knowledge, art, literature, compositions of songs, written works, caricatures, etc. that are useful for humans. IPR management can have both positive and negative consequences. Therefore, researchers will see the results of community empowerment strategies through the management of intellectual property rights for local batik products together in Kulon Progo. Informants used qualitative research with informants using snowballs. Data collection techniques are done using observation, interviews and documentation. Interviews were conducted with Bappeda and the Kulon Progo Regency industry, trade and ESDM department and the batik craft community in Kulon Progo. The Geblek renteng batik motif is a typical batik motif from Kulon Progo. Secondly, only the Kulon Progo community is permitted to produce joint-style geblek batik motifs. Third, there may not be artisans using batik stamps or printing in the making of geblek renteng batik motifs, fourth, providing training and capital assistance for batik craftsmen in the Kulon Progo region.

[HAKI merupakan salah satu lisensi yang memiliki legitimasi atas hak karya intelektual, seperti teknologi, pengetahuan, seni, literatur, komposisi musik, karya tulis, karikatur, dan lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Namun, dalam pelaksanaan IPR (Izin Pemanfaatan Ruang) memiliki dampak positif dan negatif bagi para pelaku usaha kreatif, seperti membatik. Olehnya, peneliti menelusuri hasil dari strategi pengembangan masyarakat melalui pengelolaan HAKI bagi produk batik di Kulon Progo. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode bola salju (*snowball*) sebagai metode pengumpulan informasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara bersama BAPPEDA dan Dinas Industri Kabupaten Kulon Progo, Perdagangan dan ESDM, dan komunitas perajin batik di Kulon Progo. Motif Batik Geblek Renteng merupakan khas batik Kulon Progo. Kemudian, motif ini hanya dapat ditemukan pada komunitas perajin batik di Kulon Progo secara sah dan legal. Selanjutnya, tidak ada perajin batik yang menggunakan model printing (dalam memproduksi batik) dalam pembuatan Batik Geblek. Dan, para perajin Batik Geblek sudah terlatih sebagai perajin batik di Kabupaten Kulon Progo.]

Keywords: *Intellectual Property Rights (IPR), Copyright, Community Empowerment.*

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 14.000 pulau dengan 32 provinsi, 67.900 desa, dan berpenduduk sekitar 270 juta jiwa. Indonesia

memiliki kekayaan seni budaya dan hayati yang beragam juga potensial.¹ Di samping itu suku bangsa, sumber daya alam yang melimpah serta kreativitas penduduknya menjadikan Indonesia secara keseluruhan memiliki potensi nasional yang perlu dikembangkan dan dilindungi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal penting dalam pembangunan bangsa dan negara.

Jika kekayaan tersebut tidak dijaga dan dilindungi maka kekayaan ini akan diklaim oleh bangsa lain. Saat ini tidak sedikit kekayaan intelektual bangsa Indonesia yang sudah diklaim oleh berbagai pihak, seperti yang dilakukan Malaysia. Terlebih di era perdagangan bebas (*free market*) ini, tingkat produksi yang hampir tidak dapat kita prediksi dengan cepat dan tepat. Terkadang informasi lebih cepat daripada waktu itu sendiri. Dari kasus klaim kekayaan intelektual, setidaknya terdapat tujuh kasus pengklaiman oleh Malaysia, *pertama*, pada November 2007, Malaysia mengklaim kesenian Reog Ponorogo. *Kedua*, pada Desember 2008, lagu “Rasa Sayange” yang berasal dari daerah Maluku menjadi sasaran pengklaiman oleh negara Malaysia. *Ketiga*, pada Agustus 2009, tari pendet dari Bali juga diklaim oleh Malaysia. *Keempat*, masih ditahun yang sama 2009 Malaysia kembali mengklaim kerajinan batik Indonesia. *Kelima*, pada Maret 2010 alat musik angklung yang diklaim. *Keenam* dan *ketujuh* pengklaiman dilakukan bersamaan yaitu tari tortor dan alat musik gordang sambilan. Semua pengklaiman tersebut selesai setelah ada protes dari Pemerintah Indonesia².

Kekayaan budaya Indonesia banyak macamnya seperti tari-tarian, pusaka-pusaka, artefak-artefak maupun sandang khas Indonesia salah satunya adalah batik. UNESCO bahkan mengakui kekayaan Indonesia tentang peninggalan bangsa Indonesia dalam *Masterpiece Of The Oral and Intangible Heritage Of Humanity* adalah batik pada tahun 2009³. Berbagai wilayah di Indonesia memiliki serta mengembangkan motif batik sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing untuk dijadikan identitas daerah, seperti motif batik khas Pekalongan, Cirebon, Solo dan juga Kulon Progo.

Pemerintah pusat dalam rangka menjaga dan melestarikan kearifan lokal khususnya batik dengan menghasilkan peraturan terkait. Peraturan Menteri Dalam

¹ Subroto Ahkan Muhammad and Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi* (Jakarta: Indeks, 2008), 118.

² “Malaysia Sudah Tujuh Kali Mengkalim Budaya RI,” 2013.

³ “Warisan Budaya Tak Benda,” n.d.

Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan menteri tersebut menganjurkan penggunaan pakaian sebanyak dua kali dalam seminggu yaitu hari kamis dan Jumat. Setelah kementerian dalam negeri menetapkan kebijakan itu maka daerah-daerah di seluruh Indonesia juga menindak lanjuti dengan edaran sejenis terkait penggunaan pakaian batik untuk pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah.

Tidak hanya mengikuti himbauan dari kementerian dalam negeri, Kulon Progo mengambil langkah inovatif dengan membuat motif batik khas Kulon Progo yang bernama *Geblek renteng*. Batik khas inilah kemudian yang diimbau untuk digunakan oleh setiap kalangan mulai dari anak tingkat SD, SMP, dan SMA hingga Pegawai Negeri Sipil di Kulon Progo, dengan jumlah kebutuhan kain batik pertahunnya sebanyak 70.000 ribu.⁴

Kulon Progo menjadi menarik dikaji karena pemerintah merupakan institusi yang mengelola produk ini. Masyarakat Kulon Progo menjadi satu-satunya pengrajin yang boleh memproduksi Motif batik *geblek renteng*, meskipun yang menggunakan boleh dari setiap kalangan. Hal tersebut menjadikan peluang besar bagi pengrajin batik Kulon Progo untuk tetap bertahan dalam tuntutan global dewasa ini.

Pembangunan daerah adalah pergerakan dari suatu hal yang statis menjadi hal yang dinamis. Pembangunan dapat melalui pengelolaan produk lokal ataupun potensi lokal dengan strategi-strategi yang tepat sasaran. Strategi tersebut diaplikasikan menjadi sebuah program dan kegiatan. Program dan kegiatan ini juga diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini berkeinginan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan produk lokal unggulan yaitu batik *geblek renteng* oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo?. Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan : Mengkaji bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan produk lokal batik *geblek renteng* oleh pemerintah Daerah Kulon Progo.

⁴ Sugeng Utomo and Dkk, "Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2013," 2011, 1102001.

Untuk mengetahui *novelty* dari penelitian ini, peneliti mencari penelitian terkait dengan hak kekayaan intelektual maka ada dua penelitian yang relevan, yaitu penelitiannya Romadhon pada tahun 2012 dan Pajar pada tahun 2013: Penelitian oleh Romadhon pada tahun 2012⁵ menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan batik mulai ditinggalkan yaitu: *pertama*, minimnya kepedulian dan dukungan masyarakat dalam menjaga, memelihara dan melestarikan batik. *Kedua*, kurangnya fasilitas pemerintah. *Ketiga*, desakan pasar bebas. Penelitian ini menemukan bahwa pembatik di Bantul mulai merasa kesulitan dalam *nguri-nguri* kebudayaan leluhur. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ingin diteliti. Letak perbedaannya adalah peneliti kali ini ingin melihat strategi pemberdayaan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kulon Progo dalam memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan produk lokal studi batik *geblek renteng*.

Penelitian oleh Pajar pada tahun 2013⁶ berkesimpulan bahwa batik dalam tekanan. Terjadinya tekanan disebabkan oleh perubahan sosial kebudayaan karena penggunaan batik yang dulunya sebagai pakaian sehari-hari kini mulai ditinggalkan masyarakat. Akan tetapi permasalahan tersebut dapat diatasi melalui sentuhan kebijakan. Seperti kebijakan Nomor 02 tahun 2007 perihal himbauan penggunaan batik oleh pegawai dan beberapa elemen masyarakat. Kemudian Pemkab juga menjadikan pelajaran batik sebagai pelajaran wajib di sekolah. Mengenai kebijakannya, kebijakan perihal batik dianggap sebagai kebijakan yang bersifat responsif. Perbedaan penelitian ini adalah, dari produknya, batik di Bantul tidak merupakan produk lokal unggulan, hanya sebagai produk kebudayaan leluhur. Sedangkan penelitian ini strategi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah melalui pengelolaan produk lokal unggulan atau bisa disebut menjadi produk khas Kulon Progo yaitu batik *geblek renteng*.

Memilih kerangka atau landasan menjadi sangat penting guna menjawab rumusan masalah berdasarkan teori dan dijadikan sebagai pegangan secara umum. Hal ini untuk memperoleh kemudahan dalam suatu penelitian, dengan ini perlu penulis kemukakan beberapa kerangka teori dari rumusan masalah :

⁵ M Noor Romadhon, "Arts (Batik) Under Pressure," *Jurnal Riset Daerah Edisi Khusus 1*, no. 1 (2012).

⁶ Pajar Hatma Indra J, "Kebijakan Dan Pengembangan Masyarakat; Kisah Berkembangnya Batik Bantul," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan X*, no. 2 (2013).

Sudah lebih dari 32 tahun pemerintahan daerah berada di bawah bayang-bayang pemerintah pusat dalam sistem otonom. Hal ini berubah dengan diterapkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Peran pemerintah daerah menjadi sentral dalam mengembangkan perekonomian dan kemajuan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dikelola secara mandiri untuk mencukupi kebutuhan anggaran belanja daerah.

Pendapatan daerah perkotaan akan mengandalkan sektor pajak karena memang kegiatan sektor riil berjalan kompetitif. Hal ini berbeda dengan daerah pedesaan yang kegiatan pada sektor riilnya belum berjalan dengan sehat. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah khususnya pedesaan salah satunya adalah peningkatan pendapatan daerah dari sektor non-pajak. Caranya dengan mengembangkan produk-produk unggulan daerah dan menggali semua potensi daerah yang ada seoptimal mungkin. Pemerintah daerah seyogyanya menciptakan kebijakan yang mendukung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat juga dengan melakukan pemberdayaan yang dipikirkan secara seksama. Maka dari itu pemerintah daerah selaku penanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dapat membuat strategi pemberdayaan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan yang nyata.

Tujuan dari pemberdayaan khususnya pemberdayaan masyarakat adalah memberikan power dan membentuk masyarakat mandiri, terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau tidak berdaya. Perlu adanya strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Strategi sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia⁷ memiliki makna siasat. Dapat juga diartikan sebagai suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam hal ini sasaran khusus yang dimaksud adalah pemberdayaan itu sendiri, lebih spesifik adalah pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Strategi pemberdayaan sendiri ragam macamnya, dapat disebut sebagai strategi I menurut Cholisin⁸ yang memiliki 3 sisi yaitu Menciptakan Iklim,

⁷ Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 860.

⁸ Cholisin, "Pemberdayaan Masyarakat, Di Sampaikan Pada Manajemen Pemerintah Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011," 2011.

memperkuat Daya dan melindungi. Menciptakan iklim agar dapat menjadikan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pendidikan masyarakat, akses ke dunia kesehatan serta akses menuju sumber-sumber perekonomian seperti teknologi, modal maupun informasi. Melindungi, sisi terakhir ini juga penting dalam melakukan pemberdayaan. Baik perlindungan yang lemah agar tidak kurang berdaya ketika bersaing dengan yang kuat, maupun perlindungan hak-hak yang seharusnya diperoleh bagi setiap manusia. hak kekayaan intelektual juga termasuk di dalamnya.

Selain itu menurut Suharto⁹ Pengembangan Masyarakat seharusnya dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerja sama dan proses belajar yang berkelanjutan. Sedangkan inti dalam pengembangan masyarakat yang harus dilakukan adalah Pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan. Selain melihat 3 strategi yang dilakukan oleh colisin, peneliti juga ingin melihat 3 inti pengembangan masyarakat yang dimaksud oleh suharto.

Kebijakan publik menurut Dye, "Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*)"¹⁰. Pengertian tersebut menyiratkan bahwa apapun yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan publik. Dalam konteks ini pemerintah daerah mencetuskan kebijakan dengan melakukan strategi pemberdayaan melalui pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Menurut Edward III dan Sharansky seperti dikutip oleh Widodo dalam bukunya¹¹ bahwa, "Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah(*What government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs*)".

Maka dari itu, strategi pemberdayaan diharapkan dapat menjadi ruh dalam menentukan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Baik itu secara

⁹ Edi Suharto, "Kebijakan Sosial Dan Pengembangan Masyarakat: Prespektif Pekerja Sosial," 2009, 3.

¹⁰ Subarsono AG, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

¹¹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Banyumedia, 2007).

langsung maupun tidak. Agar kesejahteraan masyarakat tercapai dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kulon Progo dengan objek yang dijadikan bahan kajian adalah batik *geblek renteng* di daerah Guleurejo, Lendah, Kulon Progo. Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober hingga November 2013, penelitian ini adalah kegiatan dana hibah BOPTN tahun 2013 yang belum pernah di publikasi sebelumnya. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena *pertama*, pendekatan ini bersifat deskriptif, sehingga memudahkan dalam memulai alur cerita. *Kedua*, pendekatan ini lebih mampu menjawab bagaimana dampak perekonomian masyarakat daerah Kulon Progo setelah pemerintah daerah melakukan pengelolaan hak kekayaan intelektual. *Ketiga*, pendekatan ini mampu mengakrabkan hubungan dengan subjek-subjek sasaran penelitian, saat berpartisipasi guna melakukan pencatatan fakta-fakta di lapangan. Selain itu juga dapat menemukan realita di lapangan agar dijadikan temuan dan untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Subjek penelitian adalah masyarakat daerah yang terkena langsung kebijakan pengelolaan hak kekayaan intelektual oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini pengrajin batik untuk *geblek renteng*. Informan lain yang terkait erat dengan kebijakan tersebut pembuat kebijakan yaitu dinas-dinas yang berperan langsung dalam mengurus industri ini.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan digabungkan dengan teknik bola salju. Penarikan informan juga berdasarkan kriteria. Pemilihan kriteria ini dilakukan karena sampel yang akan diambil harus memiliki kriteria tertentu. Menurut Spredly Terdapat 3 kriteria untuk memilih subyek penelitian seperti yang dikutip Basrowi dan Suwandi dalam bukunya¹² *pertama*, sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian. *Kedua*, terlibat penuh dalam kegiatan penelitian dan *ketiga*, memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasinya. Banyak macam cara dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi¹³. Teknik validitas data penelitian ini menurut buku metode penelitian kualitatif¹⁴ adalah

¹² Suwardi and Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka, 2008), 188.

¹³ *Ibid*,hal. 188.

¹⁴ Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2010), 324–28.

perpanjang keterlibatan, ketekunan peneliti atau pengamatan dalam bentuk atau berbagai macam kegiatan yang terlaksana dan juga menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data¹⁵ yang dibuat oleh Miles dan Huberman atau biasa disebut dengan analisis interaktif, model ini terdiri atas tiga komponen, yaitu *Pertama*, reduksi (penyederhanaan data), *Kedua* penyajian data, dan *ketiga* penarikan kesimpulan dan verifikasi.

B. Potensi Batik *geblek renteng* di Gulturejo, Lendah, Kulon Progo

Penelitian ini ingin meneliti pada bagian selatan wilayah Kulon Progo. Lebih spesifik, penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai batik geblek renteng. Maka dari itu, penelitian ini akan mengambil wilayah sentra batik di Kulon Progo yaitu Desa Gulturejo, Kecamatan Lendah. Kecamatan Lendah termasuk daerah selatan dari kabupaten Kulon Progo, daerah ini merupakan dataran rendah kisaran 0-100 meter dari permukaan laut. Lendah memiliki luas sekitar 3.559,192 Hektar atau kisaran 6,07% dari jumlah keseluruhan luas wilayah kabupaten Kulon Progo.

Kecamatan ini memiliki 6 desa atau Kelurahan yaitu Wahyuharjo, Bumirejo, Jatirejo, Sidorejo, Gulturejo, Ngentakrejo. Dari 6 desa tersebut terdapat 62 pedukuhan, 107 RW dan 346 RT¹⁶. Jumlah penduduk daerah yang berjarak sekitar 14 kilometer dari ibukota kabupaten ini sebanyak 36.447 Jiwa dengan presentasi pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2010 mengalami peningkatan sebesar 0,67 persen.

Daerah Lendah adalah pengrajin batik. Lebih spesifik adalah daerah Gulturejo dan Ngentakrejo. Banyak perajin di kedua daerah tersebut tetapi Gulturejo menjadi daerah pertama yang memproduksi batik sandang.

Kelurahan Gulturejo jika dilihat dari wilayahnya, terbagi menjadi 10 pedukuhan 28 Rukun Warga dan 65 Rukun Tetangga. Jumlah penduduk daerah ini sebanyak 7.662 jiwa. Sedangkan jika dilihat dari usaha penduduknya, daerah ini memiliki tiga jenis perajin, yaitu perajin Batik, perajin Tembaga(perak dan kuningan) dan perajin anyam-anyaman bambu. Untuk perajin tembaga mengalami penurunan setelah adanya bom Bali dan gempa bumi di Yogyakarta yang notabene adalah tujuan pasar dari hasil kerajinan tersebut.

¹⁵ J Moeloeng, Metodologi *Penelitian Kualitatif*. 2017. hal. 280.

¹⁶ Tim Penulis, "Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2011" (Kulon Progo, 2011).

Lain halnya dengan perajin batik, perajin ini masih tetap bertahan dan semakin merebak. Terdapat empat dusun yaitu Dusun Gegulu, Sembungrejo, Wonolopo dan Mendiro yang banyak memproduksi batik. Berikut Batas wilayah Gulurejo: wilayah utara berbatasan dengan Desa Ngantakrejo, wilayah selatan berbatasan dengan Desa Sidorejo, wilayah barat berbatasan dengan Desa Sri Kayangan, Sentolo dan wilayah timur berbatasan dengan Sungai Progo.

Kulon Progo merupakan daerah yang belum termasuk daerah perkotaan. Maka dari itu perputaran perekonomian masih belum sebaik perkotaan. Menurut staf Bappeda bidang Kesejahteraan masyarakat yaitu ibu Sri bahwa belanja terbesar didominasi oleh belanjanya pemerintah(baik itu pegawai maupun proyek pemerintah) seperti kata beliau:

“Karena di sini memang daerahnya masih daerah-daerah berkembang ya dek ya..... Jadi belanja terbesar di kabupaten itu masih belanja pemerintah gitu...”¹⁷

Hal ini dianggap potensi oleh pemerintah, menurut data tahun 2011 yang dibuat oleh BPS Kulon Progo dalam katalognya bahwa terdapat 11.794¹⁸ pegawai pemerintah dan perangkat desa. Jumlah pegawai dan perangkat desa tersebut ingin di manfaatkan betul oleh pemerintah, cara yang dilakukan adalah dengan mencanangkan penggunaan batik geblek renteng khusus hari kamis untuk seluruh pegawai dan perangkat desa.

Ternyata pencanangan tersebut tidak hanya diberikan kepada pegawai pemerintahan, tetapi seluruh elemen pendidikan dari mulai Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) hingga Sekolah Tinggi Lanjutan Atas (SLTA). Menurut bupati Kulon Progo Hasto menyatakan bahwa:

“Jumlah pelajar dari SD hingga SLTA di Kulon Progo ini sekitar 60 ribu orang, ditambah sekitar 10.000 PNS. Jika mereka mengenakan seragam

¹⁷ Wawancara Dengan Budiarti, 24/10/2013

¹⁸ Penulis, “Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2011,” 22.

batik sehari dalam satu minggu, butuh 70.000 lembar kain batik. Ini sudah potensi yang luar biasa,”¹⁹

Tabel 1. Presentasi jumlah siswa pada tahun 2011

No	Tingkatan Sekolah	Murid/ Siswa
1.	TK-SD	45.035
2.	SMP-SMA	35.770

Data diolah dari Katalog BPS Kulon Progo 2011

Perlu diketahui, harga batik untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Dasar (SD) berkisar 25 ribu- 30 ribu. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berkisar 60 ribu- 80 ribu. Sedangkan untuk pegawai(dewasa) berkisar 70 ribu- 120 ribu. Potensi yang luar biasa jika dikalikan dengan berapa jumlah siswa dan pegawai.

C. Sejarah Batik dari Zaman Sir Thomas di Inggris hingga Zaman Bapak Hasto di Kulon Progo

Batik pertama kali dikenal dunia pada saat batik diceritakan dalam buku *History Of Java* yang di tulis oleh Sir Thomas Stanford Raffles pada tahun 1817. Ia adalah Gubernur Inggris di Jawa semasa Napoleon menduduki Belanda. Kemudian pada tahun 1873 seorang saudagar Belanda Van Rijekvorsel memberikan selembar batik yang diperolehnya saat berkunjung ke Indonesia ke Museum Etnik di Rotterdam kemudian barulah pada awal abad ke-19 batik mulai mencapai masanya. Batik juga pernah dipamerkan pada *Exposition Universelle* di Paris pada tahun 1900 batik Indonesia memukau publik dan seniman.

Jauh ke abad 20, jejak-jejak batik mulai muncul ke hadapan publik kembali. Hal tersebut datang dari sebuah kabupaten kecil yang sebelumnya(tahun 2006) terkena amukan gempa bumi. Kabupaten tersebut adalah Bantul. Peraturan bupati nomor 02 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan hari kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul. Hari kerja ini berimbang pada penggunaan baju

¹⁹ Tim Penulis, “Pelajar Kulon Progo Kudu Pakai Batik Geblek Renteng,” [www.tempo.co, 2012, <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/20/058404840/Pelajar-Kulon-Progo-Kudu-Pakai-Batik-Geblek-Renteng>](http://www.tempo.co/read/news/2012/05/20/058404840/Pelajar-Kulon-Progo-Kudu-Pakai-Batik-Geblek-Renteng)

batik menjadi hari kamis dan hari Jumat. Aturan ini dibarengi dengan pendisiplinan dalam bentuk *punishment* (sangsi atau hukuman) pegawai yang tidak mengikuti peraturan tersebut.

Dua tahun berselang, pada tahun 2009 terjadi konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Malaysia mengklaim kerajinan batik miliki Indonesia. Tetapi ditahun yang sama pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi (*Masterpieces Of The Oral And Intangible Heritage Of Humanity*) milik Indonesia. Dengan penetapan tersebut, sudah tidak dapat dipungkiri kembali bahwa Indonesia adalah pewaris kerajinan batik tersebut. Penetapan ini memiliki efek turunan, pemerintah pusat membuat peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2009 tentang perubahan pertama atas peraturan menteri dalam negeri nomor 60 tahun 2007 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan departemen dalam negeri dan pemerintah daerah. Dalam aturan baru ini batik dijadikan pakaian dinas yang tidak hanya digunakan seminggu sekali oleh kementerian dalam negeri, tetapi menjadi dua kali yaitu hari kamis dan Jumat.

Tidak jauh dari kabupaten Bantul, kabupaten ‘tetangga’ pun membuat gebrakan yang sedikit berbeda. Tidak hanya mewajibkan pegawainya untuk menggunakan batik, tetapi Kulon Progo membuat motif batik yang menjadi motif batik khas Kulon Progo. Geblek renteng, itulah nama dari corak berbentuk angka delapan yang berenteng atau berantai.

Perlu diketahui, ide pembuatan corak batik khas Kulon Progo berawal pada saat Audiensi FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) Kabupaten Kulon Progo di ruang kerja Bupati pada tanggal 8 Desember 2011 dan kemudian ditindak lanjuti dengan mengadakan lomba desain motif batik khas Kulon Progo²⁰. Sejalan dengan data tersebut, menurut Dewantoro²¹ bahwa “desain batik itu(geblek renteng)kan awalnya dari lomba, yang menangkan itu anak SMA”. Lomba desain motif batik khas Kulon Progo tingkat Nasional kemudian perlombaan diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

²⁰ Tim Penulis, “Sejarah Lahirnya Motif Batik Khas Kulon Progo Geblek Renteng,” KulonProgokab.go.id, n.d.

²¹ Wawancara dengan kepala bidang industri, Deperindag & ESDM kabupaten Kulon Progo, 01/11/2013.

pada tanggal 1 Februari 2012. Terdapat beberapa tujuan²² yang diharapkan dalam lomba desain motif batik khas Kulon Progo seperti : a) Melestarikan dan mengembangkan seni budaya batik., b) Menggali ide kreativitas dan apresiasi masyarakat dalam merancang motif batik., c) Meningkatkan kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian budaya batik, d) Menciptakan corak ragam batik baru bermotif kekhasan Kabupaten Kulon Progo sebagai jati diri batik Kulon Progo, e) Meningkatkan promosi batik, dan f) Memajukan industri batik di Kulon Progo, dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Lomba ini ditutup pada tanggal 30 April 2012 dan diikuti oleh 304 peserta dari berbagai daerah. Terdapat 392 karya desain motif batik dari keseluruhan peserta yang mengikuti perlombaan. Setelah semua karya terkumpul, pada tanggal 1-2 Mei 2012 dilaksanakan proses penjurian dengan melihat, mencermati dan mempelajari filosofi motif batik, dan menghasilkan 6 karya nominasi. Langkah penjurian ini juga melibatkan perajin batik bertujuan memberikan saran, terutama pengaplikasian desain menjadi kain batik.

Berdasarkan penilaian Juri ada beberapa nominasi desain batik antara lain dengan judul; Kulon Progo Binangun, Angguk Putri, Manggis, Ceplok Kulon Progo dan Geblek renteng. Dari beberapa desain tersebut terpilihlah "Geblek renteng" sebagai nominator terbaik motif baru batik khas Kulon Progo, dan diumumkan secara resmi melalui berbagai media pada hari Minggu 6 Mei 2012. Mulai saat itu motif geblek renteng diperkenalkan, disosialisasikan, diproduksi dan dipasarkan kepada masyarakat luas serta dijadikan motif khas asli Kulon Progo dan merupakan salah satu ikon Kabupaten Kulon Progo.

Menurut data yang diperoleh peneliti²³, batik geblek renteng sudah terdaftar hak ciptanya dengan nomor 060873 pada tanggal 11 Oktober 2012. Pencipta desain ini adalah seorang siswa bernama Alex Candra Wibawa. Pemegang hak cipta ini sendiri adalah pemerintah kabupaten Kulon Progo.

1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Kulon Progo

Pembangunan daerah merupakan suatu pekerjaan yang kompleks, yang perlu adanya pemikiran matang dengan melibatkan berbagai elemen

²² Wawancara dengan kepala bidang industri, Deperindag & ESDM kabupaten Kulon Progo, 01/11/2013,

²³ Data olahan, diperoleh dari salah satu staf di dinas koperasi pada tanggal 01 november 2013.

yang saling bersinergi. Pemerintah memiliki berbagai macam satuan kerja pendukung, yang bertugas untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Peneliti akan melihat strategi pemerintah bersama satuan kerja perangkat daerah yang sudah direncanakan maupun sudah dilaksanakan.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo

Sebagai badan yang menciptakan konsep dalam pembangunan daerah Kulon Progo, Bappeda memiliki strategi dalam mengembangkan industri batik di Kulon Progo. Terapat beberapa langkah yang dikonsepkan oleh Bappeda²⁴ seperti:

3. Kamis Harinya Geblek renteng

Intervensi dengan ‘memanipulasi pasar’ ini dilakukan dalam bentuk himbauan kepada seluruh instansi pemerintahan. Himbauan untuk menggunakan batik dengan motif khas Kulon Progo yaitu motif *geblek renteng*. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan perekonomian perajin batik. Jika pesanan meningkat maka produksi akan terus berjalan dan jika produksi berjalan maka asap dapur perajin akan tetap mengepul. Tidak hanya mengepul, jika permohonan batik meningkat bukan tidak mungkin kesejahteraan perajin juga meningkat karena pemasukan yang juga meningkat.

4. Penyertaan Modal, Barang, Pelatihan, Pemasaran dan Kelancaran Produksi

Pemerintah memberikan berbagai macam bantuan seperti penyertaan modal. Pelatihan pernah dilakukan terhadap sekitar 30 orang yang tersebar dari beberapa daerah di Kulon Progo. Setelah pelatihan tersebut diberikan barang-barang produksi seperti kompor, malam, canting, tabung, kain dan beberapa barang penunjang produksi. Pemasaran yang dilakukan oleh Bappeda adalah menyertakan perajin untuk mengikuti pameran-pameran. Setidaknya membawa karya perajin dalam acara pameran agar motif *kash* Kulon Progo dapat dikenal luas.

Bantuan Kelancaran Produksi yaitu peralatan dan pengelolaan limbahnya. Bantuan ini bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Jawa dan Madura.

²⁴ Wawancara dengan Budiarti, 24/10/2013

Detail Engeneering Disgn (DED) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) batik di Desa Gulturejo Kecamatan Lendah yang bekerjasama dengan Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa (PPEJ) telah selesai. Bangunan fisik senilai 600 juta ini diharapkan selesai pada tahun 2014. Menurut kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) pembangunan IPAL ini diharapkan dapat mengatasi limbah batik²⁵.

Jika disimpulkan, kurang lebih terdapat lima konsep yang sudah dibuat oleh BAPPEDA dalam strategi pemberdayaan produk lokal batik geblek renteng. Manipulasi pasar, penyertaan modal, barang, pelatihan, pemasaran dan kelancaran produksi. Untuk lebih menjelaskan hal teknis mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah, peneliti akan menjabarkan rencana apa saja yang akan dan sudah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD terkait yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM (Deperindag dan ESDM)

Kepala daerah memiliki satu visi dalam pembangunan jangka menengah dan memiliki 6 misi. Salah satu misi tersebut adalah Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

Menurut peneliti ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi ketiga dari enam yang lainnya ini memiliki tujuan Untuk mewujudkan Kabupaten Kulon Progo berkualitas dalam lima tahun ke depan. Hal tersebut diwujudkan dengan mengembangkan keunggulan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Setiap program pengembangan ekonomi harus mengandung tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dalam mewujudkan visi misi kepala daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memposisikan dinasnya untuk mewujudkan visi melalui beberapa misi yang dianggap sesuai dengan ranah kerja dinas. Dinas Perindustrian, Perdagangan & ESDM serta

²⁵ Tim Penulis, "Kulon Progo Siap Atasi Limbah Batik," Krjogja.com, n.d., krjogja.com/m/reed/192365/Kulon-Progo-siap-atasi-limbah-batik.kr.

Dinas Koperasi yang dianggap memiliki andil dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Terdapat hubungan yang berbanding lurus antara teori dengan realita yang ada di Kulon Progo. Strategi pemberdayaan menurut Cholisin²⁶ yang memiliki 3 sisi yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya dan melindungi. Pemerintah melakukan ketiga hal tersebut dengan beberapa tambahan strategi yang dirasa perlu. Sisi strategi pemberdayaan pertama yaitu menciptakan iklim, pemerintah melakukan strategi ini diwujudkan dalam tujuan misi nomor 2 SKPD yang berbunyi Membentuk iklim usaha yang produktif, efisien dan dinamis dengan strateginya adalah Peningkatan kualitas usaha perdagangan. Sisi yang kedua adalah memperkuat daya, di sini pemerintah mewujudkannya dalam bentuk program peningkatan kapasitas iptek dan sistem produksi, pembinaan kemampuan teknologi industri serta pembinaan-pembinaan lainnya yang sudah dijabarkan dalam tabel di atas. Sedangkan sisi terakhir dalam strategi pemberdayaan adalah melindungi. Pemerintah melakukan perlindungan dengan mendaftarkan batik *geblek renteng* sebagai batik khas daerah Kulon Progo. Hal tersebut sudah dilakukan dengan nomor pendaftaran 060873 pendaftaran hak cipta, tertanggal 11 Oktober 2013 dengan pemegang hak ciptanya adalah pemerintah kabupaten Kulon Progo.

6. Regulasi Bidang Perindustrian: *No Printing and Just For Kulon Progo society*

Regulasi menarik yang dikeluarkan oleh perindustrian adalah tidak boleh ada alat *printing* untuk membuat batik di Kulon Progo. Hal tersebut disampaikan oleh Dewantoro²⁷ :

“Coba dibayangkan mas, jika 1000 lembar batik secara manual dapat mempekerjakan 15 orang, sedangkan jika menggunakan perinting hanya butuh 3 orang. Hal ini hanya menguntungkan yang punya modal besar mas.”

²⁶ Cholisin, “Pemberdayaan Masyarakat, Di Sampaikan Pada Manajemen Pemerintah Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011.”

²⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Industri, Deperindag & ESDM kabupaten Kulon Progo, 01/11/2013.

Memang cukup aneh jika teknologi penunjang perindustrian justru dibatasi keberadaannya. Tetapi, jika melihat penjelasan tersebut, pemerintah memiliki maksud tersendiri. Tujuan pemerintah adalah untuk melindungi perajin kecil dan melindungi masyarakat menengah ke bawah, dengan menciptakan ekonomi kerakyatan.

Strategi penunjang lainnya yang dilakukan pemerintah adalah dengan hanya memberikan kesempatan memproduksi batik khas Kulon Progo oleh warga asli daerah. Hal ini sejalan dengan semangat bela-beli Kulon Progo²⁸. Jika yang memproduksi hanya boleh warga asli Kulon Progo akan menyerap tenaga kerja warga asli, kemudian hasil yang diperoleh dari regulasi ini akan dirasakan oleh warga Kulon Progo sendiri.

D. Strategi Pemberdayaan yang Tepat Sasaran

Strategi pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah banyak macamnya, tetapi strategi tersebut akan lebih bijak jika tepat sasaran. Peneliti ingin mengkategorikan strategi pemberdayaan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Perajin Besar Pemberdayaan dengan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)

Perajin besar, memerlukan pemberdayaan yang tidak hanya sebatas pelatihan dan sosialisasi peminjaman modal. Perajin besar sudah memiliki keahlian sehingga tidak perlu adanya pelatihan pembuatan batik. Begitu pula dengan peminjaman modal, perajin besar sudah memiliki pasar yang jelas dan berjalan secara kondusif. Sehingga akses terhadap permodalan sebaiknya dapat diberikan kepada yang betul-betul membutuhkan.

Maka dari itu, pemberdayaan yang dilakukan sebaiknya difokuskan kepada limbah yang dihasilkan oleh perajin besar ini. Contoh kasus Batik Farras, pemerintah seyogyanya mengelompokkan perajin sekaliber batik farras untuk melakukan pemberdayaan pengelolaan limbah. Pengelompokan

²⁸ Pada saat peneliti berkunjung ke dinas koprasir Kulon Progo, terdapat banyak karung beras yang berada diatas meja pegawai. Setelah peneliti tanyakan, ternyata beras tersebut adalah beras lokal Kulon Progo yang dibeli oleh seluruh karyawan. Hal ini dilakukan hampir disetiap SKPD Kulon Progo. Sehingga semangat bela-bei Kulon Progo benar-benar digaungkan mulai dari pegawai pemerintah sendiri. Wawancara dengan salah satu staf Dinas Koprasi Kulon Progo, 01/11/2013

berbasis lapangan ketika melaksanakan pemberdayaan program dan kegiatan ini efektif dan tepat sasaran.

2. Perajin Menengah Pemberdayaan dengan Memberikan Akses Permodalan dan Membantu Pemasaran

Perajin menengah ini adalah perajin yang sudah memiliki kemampuan yang mumpuni dengan bukti sudah dapat menghasilkan karya. Perajin kelas menengah ini sudah memiliki pengalaman dalam pembuatan.

Contoh studi batik Sambayung, batik ini sudah memiliki kemampuan untuk membuat batik, memiliki jaringan beberapa perajin sekitar dan juga memiliki tempat untuk dijadikan art galery. Maka dari itu, batik ini dapat dikategorikan batik menengah.

Pemberdayaan yang dilakukan sebaiknya adalah pemberian akses permodalan. Untuk memproduksi lebih banyak batik, perajin kategori ini terhambat permasalahan modal. Sedangkan jika sudah memproduksi banyak, kategori ini selayaknya dibantu dalam pemasarannya. Pemerintah memiliki andil dalam proses pemasaran ini.

3. Perajin Kecil Memerlukan Pelatihan

Perajin kategori ini adalah masyarakat yang memiliki minat atau keinginan untuk menjadikan dirinya sebagai perajin batik. Kategori ini masih belum memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam dunia batik.

Contoh kasus adalah ibu Etik yang sudah pernah mengikuti pelatihan, tetapi masih belum cukup memiliki pengetahuan. Dalam kategori ini strategi pemberdayaannya adalah dengan memperkuat daya melalui pelatihan membatik. Jika kemampuan membatik sudah dimiliki atau sudah termasuk dalam kategori menengah, barulah strategi pemberdayaannya diubah sesuai dengan kategori menengah.

E. Simpulan

Dari pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan melalui pengelolaan produk lokal batik *geblek renteng* di laksanakan oleh Bappeda dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. Kedua dinas tersebut memiliki rencana masing-masing dalam melakukan strategi pemberdayaan. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai strategi pemberdayaan menurut masing-masing dinas pertama, Dinas Badan

Pengembangan dan Pembangun Daerah (Bappeda). Bappeda memiliki beberapa sub bagian, bagian kesejahteraan merupakan bagian yang mengonsep strategi pemberdayaan. Berikut beberapa konsep yang dilakukan oleh BAPPEDA adalah Kamis Harinya *Geblek renteng* dan penyertaan modal, barang, pelatihan, pemasaran dan kelancaran produksi. Kedua, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM (Deperindag dan ESDM). Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) ini merupakan dinas yang bersentuhan langsung dengan perindustrian batik. Peran dinas ini menjadi sangat penting berikut strategi pemberdayaan yang dilakukan: 1) Rencana Strategis Dinas Perindustrian, 2) Strategi pengembangan dan pemberdayaan industri kecil menengah menggunakan tiga kebijakan: mengembangkan kegiatan usaha industri kecil dan menengah, mengembangkan kegiatan usaha industri kecil dan menengah dan meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia industri kecil menengah. 3) Regulasi bidang perindustrian: *no printing and just for kulon progo society.*

Peneliti juga menemukan akan perlu adanya strategi yang tepat sasaran dalam melakukan pemberdayaan. strategi yang tepat sasaran dalam penelitian ini akan dibagi menjadi tiga bagian, berikut pembagian strategi tepat sasaran yang dikemukakan oleh peneliti: 1) perajin besar pemberdayaan dengan intalasi pembuangan air limbah(IPAL), 2) perajin menengah pemberdayaan dengan meberikan akses permoodalan dan membantu pemasaran, dan 3) perajin kecil memerlukan pelatihan. Kesemua strategi pemberdayaan sudah dikonsep dan sebagian sudah dilakuakan oleh pemerintah. Konseko-konsep tersebut sesuai dengan kebutuhan dari para perajin yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

AG, Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ahkan Muhammad, Subroto, and Suprapedi. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta: Indeks, 2008.

Cholisin. "Pemberdayaan Masyarakat, Di Sampaikan Pada Manajemen Pemerintah Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian

Tahun 2011,” 2011.

Hatma Indra J, Pajar. “Kebijakan Dan Pengembangan Masyarakat; Kisah Berkembangnya Batik Bantul.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan X*, no. 2 (2013).

J Moeloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2010.

“Malaysia Sudah Tujuh Kali Mengkirim Budaya RI,” 2013.

Noor Romadhon, M. “Arts (Batik) Under Pressure.” *Jurnal Riset Daerah Edisi Khusus 1*, no. 1 (2012).

Penulis, Tim. “Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2011.” Kulon Progo, 2011.

_____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

_____. “Kulon Progo Siap Atasi Limbah Batik.” Krjogja.com, n.d.
krjogja.com/m/reed/192365/Kulon-Progo-siap-atasi-limbah-batik.kr.

_____. “Pelajar Kulon Progo Kudu Pakai Batik Geblek Renteng.” [www.tempo.co](http://www.tempo.co/read/news/2012/05/20/058404840/Pelajar-Kulon-Progo-Kudu-Pakai-Batik-Geblek-Renteng), 2012. <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/20/058404840/Pelajar-Kulon-Progo-Kudu-Pakai-Batik-Geblek-Renteng>.

_____. “Sejarah Lahirnya Motif Batik Khas Kulon Progo Geblek Renteng.” KulonProgokab.go.id, n.d.

Suharto, Edi. “Kebijakan Sosial Dan Pengembangan Masyarakat: Prespektif Pekerja Sosial,” 2009.

Suwardi, and Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka, 2008.

Rahadiyand Aditiya

Utomo, Sugeng, and Dkk. "Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2013," 2011,
1102001.

"Warisan Budaya Tak Benda," n.d.

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia, 2007.

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

Vol. 10, No. 2, Desember 2019

GRADUASI MANDIRI: BENTUK KEBERDAYAAN PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN PATI

Nur Khoiriyyah

Institut Pesantren Mathali'ul Falah

khoir@ipmafa.ac.id

Kunarti

Institut Pesantren Mathali'ul Falah

andikunarti@gmail.com

Abstract: *Independent graduation, is a phenomenon of resignation from PKH program membership. This is different from some other social ministry programs. Programs that encourage the empowerment of beneficiary communities. Based on this uniqueness, this study specifically examines how the condition of PKH participants before and after graduation, as well as looking for forms of empowerment that are owned by PKH Graduasi Mandiri participants. Field findings indicate the empowerment process carried out by PKH facilitators through regular monthly meetings. Assistance is filled with the delivery of empowerment material. Materially, not much amount of assistance was received, but the assistance was carried out continuously. The form of KPM PKH empowerment after independent graduation can be seen through five indicators, including freedom of mobility, ability to buy small commodities, being involved in household decision making, having relative freedom from family domination, and having economic security and contribution to the family.*

[Graduasi mandiri merupakan fenomena pengunduran diri dari keanggotaan program PKH. Hal yang berbeda dari beberapa program pelayanan sosial lainnya. Program yang mendorong pemberdayaan masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan keunikan ini, penelitian ini secara khusus meneliti bagaimana kondisi peserta PKH sebelum dan sesudah lulus, serta mencari bentuk-bentuk pemberdayaan yang dimiliki oleh peserta PKH Graduasi Mandiri. Temuan lapangan menunjukkan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh fasilitator PKH melalui pertemuan rutin bulanan. Bantuan berbentuk pengiriman materi pemberdayaan. Secara material, tidak banyak bantuan yang diterima, tetapi bantuan itu dilakukan terus menerus. Bentuk pemberdayaan KPM PKH setelah lulus secara mandiri dapat dilihat melalui lima indikator, termasuk kebebasan mobilitas, kemampuan untuk membeli komoditas kecil, terlibat dalam pengambilan keputusan rumah tangga, memiliki kebebasan relatif dari dominasi keluarga, dan memiliki keamanan ekonomi dan kontribusi kepada keluarga]

Keywords: *Graduasi Mandiri, empowerment, PKH*

A. Pendahuluan

Pemerintah mengupayakan percepatan penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 melalui Kementerian Sosial. Program-program kesejahteraan yang turun dari pemerintah selalu berhadapan dengan tantangan yang beragam. Mulai dari

tantangan pelaksanaan hingga tantangan dalam hal kemamouan pemerintah melakukan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan. Begitu juga dengan Program Keluarga Harapan (PKH), program ini memiliki histori yang dapat merepresentasikan sejauh mana upaya pemerintah dalam menerapkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi kepada masyarakat Indonesia. Pelaksanaan program PKH ada yang berupa pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Karakteristik PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat yaitu, membuka akses keluarga miskin dengan anggota keluarga ibu hamil, nifas, menyusui, balita, dan anak usia sekolah, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar (PAUD) hingga pendidikan atas (SMA/sederajat) yang tersedia di sekitar mereka.

KPM PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan orientasi meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan kesehatannya. Selain itu, PKH juga memfasilitasi akses KPM terhadap kebutuhan pangan dan gizi, perawatan, pendampingan, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya sebagai program komplementer PKH secara berkelanjutan.¹

Wilayah kerja PKH di Kabupaten Pati meliputi 21 kecamatan mulai dari tahun 2013. Jangkauan kerja ini memiliki jumlah KPM yang berbeda di setiap kecamatan, dengan demikian jumlah pendamping disesuaikan dengan perbandingan kurang lebih 1:300 KPM. Namun fakta di lapangan terdapat perbandingan 1:400 di wilayah dengan komposisi KPM yang banyak.² Kabupaten Pati sendiri memiliki jumlah KPM sebanyak 59.234 KK dan pendamping sejumlah 196 orang yang terbagi dalam 21 kecamatan penerima PKH per bulan Mei tahun 2019.

Graduasi menjadi hal menarik sekaligus menjadi ciri khas dari bantuan sosial PKH, sekaligus membedakannya dari pola-pola bantuan sosial pemerintah yang lain. Merujuk Permensos RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH),³ graduasi ialah berakhirnya masa kepesertaan KPM

¹ Program Keluarga Harapan, <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan>, diakses pada 09/04/19 pukul 11.00.

² Wawancara dengan Agus Supriyanto, S.Pi (Koordinator Kabupaten Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten Pati) di Rumah Makan Omah Sawah Margoyoso, 10 Juli 2019 pukul 13.15 WIB.

³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

PKH, meskipun program PKH sendiri masih berlangsung. Graduasi berkaitan dengan prasyarat menjadi KPM PKH, selain kondisi tidak dan atau kurang mampu, KPM harus merupakan ibu hamil, menyusui, memiliki anggota keluarga balita, usia wajib belajar, orang dengan disabilitas, dan lanjut usia. Jika kondisi KPM dinilai telah mandiri secara ekonomi dan atau tidak lagi memenuhi syarat kondisional sebagai KPM PKH seperti, bukan termasuk ibu hamil-menyusui, tidak memiliki anak yang sedang bersekolah, dan tidak memiliki anggota keluarga dengan disabilitas dan lanjut usia, maka KPM tersebut akan graduasi.

Umumnya, mereka memiliki usaha yang dirintis dari skala kecil namun telah berjalan lancar. Bagaimanapun, tidak banyak masyarakat penerima bantuan sosial yang akan berinisiatif untuk mengundurkan diri sebagai penerima manfaat bantuan sosial ketika merasa telah mampu, akan tetapi hal ini terjadi di dalam program PKH. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini fokus pada graduasi KPM PKH yang merasa telah mampu mandiri dan meningkatkan taraf ekonominya, kemudian mengajukan graduasi alamiah secara mandiri kepada pendamping, di wilayah Kabupaten Pati.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk melihat realitas sosial graduasi mandiri KPM PKH di Kabupaten Pati, sebagai kondisi yang holistik dan dinamis. Penelitian ini mengambil sekup penelitian di wilayah dampingan PPKH Kabupaten Pati. Terutama di wilayah dampingan yang terdapat graduasi mandiri KPM PKH, yaitu di Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Wedarijaka, dan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling*.⁴ Dengan informan utama berasal dari koordinator PKH Kabupaten Pati. Sumber data utama menggunakan kata-kata dan tindakan yang secara teknis diperoleh melalui wawancara mendalam⁵ dan observasi terhadap objek penelitian,⁶ dilengkapi dengan tambahan data dokumen.⁷

⁴ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, 13.

⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006 179.

⁶ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2014 267

⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya: 2014, 219.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori analisis data dari Miles dan Huberman. Sebagaimana disampaikan oleh keduanya, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yaitu melalui proses *collecting data, data reduction, data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁸ Untuk menepis kecurigaan banyak pakar terkait keabsahan data kualitatif, penelitian ini menggunakan validitas data triangulasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sekaligus sebagai uji validitas data. Teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas sumber dan data penelitian ini, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu.⁹

B. Pembahasan

Kondisi Objektif KPM PKH di Kabupaten Pati

Data awal KPM PKH di Kabupaten Pati pada tahun 2013 ketika PKH diimplementasikan pertama kali, adalah berdasar pada Basis Data Terpadu (BDT) dari Dinas Sosial yang telah lama tidak diperbarui. Menjelang proses pencairan bantuan tahap I para pendamping melakukan *cleaning data* di masing-masing wilayah dampingannya. Pada kenyataannya, *cleaning data* sebagai upaya meminimalisir distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran justru menimbulkan konflik di masyarakat.

Para pendamping PKH kemudian menyikapinya dengan terus melakukan pendekatan kelompok melalui pertemuan kelompok rutin, dan atau pendekatan individual untuk meyakinkan KPM PKH yang telah mampu untuk bersedia mengajukan pengunduran diri sebagai KPM PKH. Pendistribusian bantuan sosial idealnya didukung dengan kerjasama semua pihak. Dalam hal ini pemerintah desa menjadi ujung tombak keberhasilan upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial.

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Pati tahun 2018-2019

Pada tahun 2013 di masa awal pelaksanaannya, KPM PKH menerima jumlah dana bantuan yang berbeda menurut banyaknya anggota keluarga yang menerima bantuan dan kategori yang dimiliki. KPM PKH yang memiliki seorang anak usia SD, akan menerima jumlah bantuan yang berbeda dengan KPM PKH

⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009, 246

⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya: 2014, 331

dengan ibu hamil dan memiliki seorang anak usia SD, dan berbeda pula dengan KPM PKH dengan seorang anak usia SMA.

KPM PKH dengan anak usia SD akan menerima bantuan sosial sebanyak Rp.900.000 pertahun, anak usia SMP sebanyak Rp.1.500.000 pertahun, anak usia SMA sebanyak Rp.2.000.000 pertahun, ibu hamil, balita, lansia, dan disabilitas sebanyak Rp.2.400.000 pertahun. Bantuan sosial ini dicairkan dalam 4 (empat) tahap secara langsung kepada KPM PKH melalui ATM BNI.

Pada tahun 2017, dana bantuan untuk seluruh KPM PKH disamakan sejumlah Rp.2.000.000 pertahun. Jumlah dana bantuan sosial ini berlaku sama untuk seluruh KPM PKH dengan jumlah anggota keluarga kandung penerima kategori bantuan yang beragam. Kemudian pada tahun 2018, pola penyeluran dana bantuan sosial kembali seperti pada tahun 2013, ditambah bantuan komplementer berupa beras dan telur.

PKH Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat

Winarni dalam bukunya *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan* memberikan pernyataan bahwa pemberdayaan memiliki inti pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi (*empowering*), dan terciptanya kemandirian (*independency*).¹⁰ Temuan Lapangan menunjukkan adanya ketiga inti pengembangan tersebut. Pertama, Pengembangan, program PKH selain terlaksana berupa penyeluran dana bantuan sosial, juga berupa pemberian informasi terkait pengembangan wawasan KPM PKH melalui pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok yang dilakukan setiap satu bulan sekali ini menjadi forum kontrol kepesertaan yang bersifat non formal. Setiap desa memiliki beberapa kelompok sesuai dengan kebijakan masing-masing pendamping PKH setempat.

Dalam pertemuan ini pendamping melakukan *monitoring* dan evaluasi secara non formal terkait kedisiplinan KPM PKH dalam penggunaan dana untuk pendidikan dan kesehatan. Beberapa KPM PKH dampingan yang tidak disiplin dalam pembayaran biaya pendidikan akan mendapatkan teguran dari pendamping. *Monitoring* dan evaluasi ini meliputi belanja penggunaan dana PKH, kehadiran peserta didik di sekolah, kedatangan ibu hamil ke fasilitas kesehatan, kehadiran balita di Posyandu, dan penyampaian materi P2K2.

¹⁰ Ambar Teguh Sulistiyan, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004, 79.

Penyampaian materi P2K2 sendiri menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan KPM PKH. Materi P2K2 antara lain berupa film pendek dan modul dengan tema beragam. Melalui materi ini pendamping memberikan motivasi dan edukasi kepada KPM PKH untuk menjadi pelopor keluarga berkualitas di masyarakat sekitarnya.

Kurikulum modul berseri P2K2 terdiri dari pengetahuan tentang edukasi keluarga, kesehatan keluarga dan lingkungan, dan pengelolaan keuangan keluarga. Modul dan materi P2K2 meliputi beberapa tema sebagai berikut:

Tabel I : Daftar Modul Pertemuan Kelompok KPM PKH

Modul Pendidikan
Sesi 1 : Menjadi Orang Tua yang Lebih Baik
Sesi 2 : Memahami Perilaku Anak
Sesi 3 : Memahami Cara Anak Usia Dini Belajar
Sesi 4 : Membantu Anak Sukses di Sekolah
Modul Ekonomi
Sesi 5 : Mengelola Keuangan Keluarga
Sesi 6 : Cermat Meminjam dan Menabung
Sesi 7 : Memulai Usaha
MODUL KESEHATAN
Sesi 8 : 1000 hari Pertama Kehidupan
Sesi 9 : Sesi 9: Anak dan Balita
Sesi 10 : Sesi 10: Higinitas, Sanitasi dan Penyakit
MODUL PERLINDUNGAN ANAK
Sesi 11: Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
Sesi 12 : Pencegahan Penelantaran dan Eksploitasi terhadap Anak
Modul Perlindungan Penyandang Disabilitas
Sesi 13 : Perlindungan Penyandang Disabilitas
Modul Kesejahteraan Lansia
Sesi 14 : Kesejahteraan Lansia

Sumber : Form Pelaksanaan P2K2 PKH 2019

Kedua, Memperkuat potensi, dalam pendistribusian dana bantuan sosial dan pertemuan PKH yang kepesertaannya diikuti oleh perempuan, memberikan penguatan potensi bagi perempuan itu sendiri, mengingat dalam sekup keluarga

perempuan biasanya menjadi penanggung jawab di sektor pendidikan dan kesehatan keluarga.

Dengan adanya bantuan sosial yang difokuskan untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan ini, perempuan sebagai potensi dalam keluarganya mendapatkan pengetahuan mengenai pola asuh anak, wawasan pendidikan yang baik untuk anak, dan manajemen keuangan keluarga dapat menjadi lebih baik, oleh pendamping PKH melalui pertemuan kelompok.

Ketiga, Mendorong kemandirian, program PKH yang memberikan spesifikasi pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial ini mendorong kemandirian bagi KPMnya. Melalui program PKH ini diharapkan masyarakat miskin dapat lebih mudah mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan secara lebih memadai. Hal ini salah satunya terkait dengan pencegahan generasi dengan *stunting*. Dengan adanya bantuan dana bagi pemenuhan gizi ibu hamil dan balita, PKH mendorong terwujudnya pemenuhan gizi yang baik bagi masyarakat sejak dalam masa kehamilan.

Komponen utama pemberdayaan dalam PKH sendiri terletak pada unsur pendamping dan materi pendampingan kelompok (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Sebagaimana yang disampaikan oleh Ife dalam bukunya *Community Development*, salah satu peran pendamping pekerja sosial adalah peran dan keterampilan menfasilitasi.

Dalam konteks PKH, peran dan keterampilan pendamping sangat menentukan progresivitas KPM PKH dampingannya. Para pendamping Program PKH dibekali berbagai keterampilan pendampingan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 disebutkan, peningkatan kapasitas SDM pelaksana PKH dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan teknis (Bimtek), dan bimbingan pemantapan kebutuhan program.

Graduasi Mandiri KPM PKH

Graduasi menjadi hal menarik sekaligus menjadi ciri khas dari bantuan sosial PKH. Merujuk Permendes RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH),¹¹ graduasi ialah berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH, meskipun program PKH sendiri masih berlangsung. Di Kabupaten Pati,

¹¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

kategori graduasi dibagi menjadi 5 (lima) kategori, *pertama*, graduasi non komponen (2.361), *kedua*, graduasi mandiri (102), *ketiga*, graduasi karena tidak ditemukan (dihapus alokasinya) (42), *keempat*, mampu (1.675), dan *kelima*, dobel kepesertaan (25). Adapun jumlah graduasi kategori non komponen dan mampu mendominasi, dengan selisih cukup besar dibandingkan graduasi kategori mandiri, tidak ditemukan, dan dobel kepesertaan.¹²

Selain purna prasyarat KPM PKH sebagaimana disebut di atas, graduasi alamiah atau mandiri dapat terjadi jika KPM PKH mengajukannya atas inisiatif pribadi karena merasa telah mampu secara ekonomi dan mandiri tanpa menjadi KPM PKH. Hal ini menjadi sangat menarik mengingat banyak KPM PKH yang mengajukan graduasi mandiri tetapi menurut standar keluarga miskin secara umum, KPM PKH tersebut masih tergolong keluarga miskin. Umumnya, mereka memiliki usaha yang dirintis dari skala kecil namun telah berjalan lancar.

Proses Pendampingan Melalui Pertemuan Kelompok

Pertemuan kelompok, KPM PKH didorong menjadi KPM graduasi melalui materi-materi *family development session (FDS)* yang disusun dalam kurikulum khusus. Materi-materi tersebut menjadi bentuk proses pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan PKH. Secara teknis, pemberdayaan dalam PKH melalui pertemuan kelompok sesuai dengan tahapan pemberdayaan berupa penyadaran, transformasi, dan peningkatan kemampuan intelektual.

Pertama, penyadaran, KPM PKH memperoleh wawasan baru misalnya tentang pengasuhan dan pendidikan anak, isu-isu kekinian seperti *stunting*, PHBS, pemenuhan gizi anak dan keluarga, manajemen keuangan keluarga, serta pengembangan ekonomi keluarga. *Kedua*, Tahapan pemberdayaan selanjutnya yaitu transformasi. Dalam pertemuan kelompok KPM PKH, pendamping PKH memberikan wawasan dan pelatihan pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Ketiga, Tahap peningkatan kemampuan intelektual KPM PKH melalui pertemuan kelompok selain dapat dilihat dari pemberian materi tentang *FDS*, para pendamping memberikan motivasi kemandirian ekonomi kepada KPM PKH dengan menceritakan profil KPM PKH yang telah graduasi mandiri dengan usaha ekonomi produktif yang dirintis mulai dari nol, pada kesempatan tertentu

¹² Menurut hasil Pemutakhiran Data Peserta PKH Non Eligible (NE) PPKH Kabupaten Pati tahun 2018-2019.

pendamping juga menghadirkan KPM PKH yang telah graduasi mandiri tersebut untuk menyampaikan langsung pengalaman kemandirian ekonomi yang dimiliki pada pertemuan kelompok KPM PKH yang lain.

Proses Pendampingan Melalui Pendekatan Individual

Selain upaya pendamping PKH memotivasi kemandirian ekonomi KPM PKH melalui pertemuan kelompok, pendamping PKH melakukan pemberdayaan dan mendorong graduasi mandiri KPM melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini umumnya dilakukan terhadap KPM PKH dengan kondisi ekonomi tergolong mampu dan tidak layak menjadi KPM PKH, akan tetapi tidak bersedia dihapus sebagai KPM PKH.

Pendekatan individual dimaksudkan agar kecemburuhan sosial antar KPM PKH tidak berkepanjangan, dan KPM PKH bersedia mengundurkan diri dari kepesertaan sebagai KPM PKH.

Faktor-faktor Berpengaruh dalam Graduasi Mandiri KPM PKH

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dan penghambat Graduasi Mandiri. Faktor-faktor pendorong graduasi mandiri meliputi lima hal yaitu Pendamping, materi pendampingan, kesempatan usaha, dan kontrol sosial. *Pertama*, Pendamping, Pendamping PKH berperan besar dalam mendorong dan meyakinkan KPM PKH yang dinilai telah mandiri secara ekonomi untuk melakukan graduasi mandiri. Menurut data yang terhimpun di lapangan, faktor pendamping memang menjadi faktor utama untuk mendorong keberdayaan KPM PKH hingga mampu graduasi mandiri. Kepekaan, keterampilan, dan semangat seorang pendamping sangat menentukan kegigihan usahanya mengantarkan graduasi KPM PKH dampingannya. Dari tiga kecamatan yang peneliti kunjungi yaitu Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Wedarijaka, dan Kecamatan Margoyoso, terlihat perbedaan motivasi dan progresivitas para pendamping menuju graduasi mandiri para KPM PKHnya.

Kedua, Materi pendampingan. Pertemuan kelompok rutin KPM PKH dilengkapi dengan materi-materi berseri yang disusun dengan kurikulum khusus dari Kementerian Sosial. Para pendamping pun mengikuti diklat materi ini sebelum menyampaikannya kepada KPM. Selain untuk mendorong graduasi mandiri KPM PKH, materi ini lebih cenderung mengarahkan KPM PKH pada visi mewujudkan keluarga berkualitas melalui kesadaran tentang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Para KPM PKH graduasi mandiri yang kami temui menyatakan senang mendapatkan pengarahan dan ilmu-ilmu baru dari para pendamping. Utamanya berkaitan dengan kehamilan, gizi, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Bagaimanapun, tidak menutup kemungkinan dana bantuan sosial PKH dapat disalah gunakan oleh KPM PKH pada kebutuhan komplementer yang tidak mendesak, utamanya oleh KPM PKH yang sebetulnya tergolong mampu secara ekonomi.

Ketiga, Kesempatan usaha. Meskipun tidak menjadi bagian langsung dari PKH, akan tetapi faktor ini sangat berpengaruh pada graduasi mandiri KPM PKH. Pada umumnya, KPM PKH yang mengajukan graduasi mandiri merasa telah mampu secara ekonomi dalam mencukupi kebutuhan yang selama ini dibantu dengan PKH. *Keempat*, Kontrol sosial. Kontrol sosial dari sesama KPM PKH maupun masyarakat di lingkungan KPM PKH dapat berlaku sebagai sanksi sangat tegas kepada KPM PKH yang dinilai telah mampu mandiri dan layak mengajukan graduasi mandiri, dan atau layak dihapus dikarenakan tidak bersedia mengajukan graduasi mandiri. Kontrol sosial dalam konteks PKH dapat mendesak KPM PKH dalam skala sosial untuk mengajukan graduasi mandiri.

Sedangkan faktor penghambat graduasi mandiri ada dua hal yaitu Nominal dana bantuan sosial PKH yang cukup besar dan Prosedur penghapusan yang cukup susah. *Petama*, Jumlah dana bantuan sosial PKH yang diberikan pemerintah secara berjenjang, dan bersifat kalkulatif menurut kategori anggota keluarga yang menerima, di sisi yang lain justru menjadi pemicu KPM PKH merasa enggan termotivasi untuk mandiri dan mengajukan graduasi mandiri.

Kedua, Prosedur penghapusan kepesertaan KPM PKH. Ketika terdapat aduan masyarakat atau hasil verifikasi data KPM PKH menunjukkan adanya distribusi yang tidak tepat sasaran, pendamping dapat menghapus kepesertaan KPM PKH yang bersangkutan jika terdapat salah satu rekomendasi bukti.

Bentuk Keberdayaan KPM PKH Graduasi Mandiri

Keberdayaan KPM PKH graduasi mandiri secara teoritis dalam penelitian ini dilihat dengan indikator keberdayaan menurut Schuler, Hashemi, dan Riley,¹³ dalam aspek-aspek yang disebut dengan *empowerment index* yang meliputi: kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan

¹³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2017, 63-64

membeli komoditas besar, terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, kebebasan relatif dari dominasi keluarga, kesadaran hukum dan politik, keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, jaminan ekonomi, dan kontribusi terhadap keluarga.

Pertama, Kebebasan mobilitas. Untuk kebutuhan pencairan dana bantuan sosial PKH, KPM PKH dapat dengan leluasa keluar dari rumah menuju tempat-tempat pencairan dana bantuan, kemudian menggunakan dana bantuan tersebut untuk belanja pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. *Kedua*, Kemampuan membeli komoditas kecil. Selama menjadi peserta penerima manfaat bantuan, KPM PKH memiliki kemampuan membeli komoditas kecil kebutuhan sehari-hari. Mereka mendapatkan alokasi dana tambahan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Ketiga, Kemampuan membeli komoditas besar. Dengan jumlah dana bantuan yang telah ditentukan pemerintah, tidak banyak KPM PKH yang dapat membeli komoditas besar tanpa mendapat penghasilan maupun permodalan usaha dari sektor lain. *Keempat*, Terlibat dalam keputusan rumah tangga. Setiap keluarga memiliki mekanisme yang berbeda dalam memutuskan hal-hal penting dalam keluarga. Salah satu contoh sederhananya adalah tentang pendidikan anak. Pemilihan pendidikan anak oleh KPM PKH secara umum telah diputuskan secara dialogis antara suami dan istri. *Kelima*, Kebebasan relatif dari dominasi keluarga. Temuan lapangan menunjukkan, keluarga KPM PKH tidak lagi mendapatkan dominasi keluarga, terutama mengenai pendidikan dan kesehatan. Beberapa pengetahuan atau mitos juga telah dapat didiskusikan dalam keluarga dalam wawasan yang lebih terbuka.

Keenam, Kesadaran hukum dan politik. Dalam bentuk kesadaran hukum dan politik KPM PKH tidak banyak mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari keterangan para informan KPM PKH yang tidak banyak yang ikut serta dalam organisasi desa. *Ketujuh*, Tidak banyak keterlibatan KPM PKH baik selama menjadi peserta maupun setelah graduasi mandiri dalam kampanye atau kegiatan besar lainnya. Kegiatan KPM PKH lebih banyak pada pertemuan kelompok dan penyaluran bantuan. *Kedelapan*, Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, hal ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan KPM PKH. Dengan adanya subsidi dana untuk

pendidikan dan kesehatan, KPM PKH tidak lagi terbebani mengenai pemenuhan kebutuhan tersebut.

Tabel II : Bentuk Keberdayaan KPM PKH Graduasi Mandiri

No	Indikator Keberdayaan	Nilai
1	Kebebasan Mobilitas	✓
2	Kemampuan membeli komoditas kecil	✓
3	Kemampuan membeli komoditas besar	-
4	Terlibat dalam keputusan keluarga	✓
5	Kebebasan relatif dari dominasi keluarga	✓
6	Kesadaran Hukum dan Politik	-
7	Keterlibatan dalam Kampanye	-
8	Jaminan Ekonomi dan Kontribusi terhadap keluarga	✓

Sumber: Rangkuman Data Penelitian

C. Penutup

Berdasarkan data yang telah dihimpun dan diolah dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Kondisi objektif KPM PKH di Kabupaten Pati masih tercampur antara masyarakat golongan mampu dan tidak mampu. Hal ini disebabkan data BDT yang digunakan telah lama tidak dimutakhirkan. Pendamping PKH menyikapinya dengan melakukan verifikasi dan konfirmasi data KPM PKH secara langsung dan terus-menerus bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat, agar dana bantuan sosial PKH dapat terdistribusikan secara tatacara sasaran.

PKH sebagai program bantuan sosial pemerintah memiliki nilai-nilai pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan melalui PKH salah satunya dapat dilihat dari graduasi mandiri yang diajukan KPM PKH. Graduasi mandiri sendiri dipengaruhi beberapa faktor pendorong seperti visi pendamping, materi pertemuan kelompok, kesempatan usaha, dan kontrol sosial, serta faktor penghambat seperti jumlah nominal bantuan dan prosedur penghapusan kepesertaan KPM PKH.

Bentuk keberdayaan KPM PKH paska graduasi mandiri dapat dilihat melalui lima indikator, antara lain kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil, terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga, memiliki kebebasan relatif dari dominasi keluarga, serta memiliki jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. Sedangkan dua indikator tiga indikator keberdayaan lainnya seperti kemampuan membeli komoditas besar, keterlibatan dalam kampanye, dan kesadaran hukum dan politik kurang berdaya. KPM PKH

sebelum mengajukan graduasi mandiri umumnya memiliki usaha ekonomi produktif baik yang dirintis sendiri, dengan pasangan, maupun secara berkelompok dalam KUBE yang telah berjalan bahkan berkembang.

Beberapa saran berdasarkan temuan hasil penelitian yang dapat diajukan, *pertama* Pemerintah hendaknya melakukan verifikasi data calon penerima bantuan sosial secara langsung dan komprehensif ke masyarakat sebelum pencairan, untuk mengkonfirmasi data terkait kelayakan penerimaan bantuan, mencegah timbulnya konflik antara masyarakat yang benar-benar layak dan merasa layak menerima bantuan, serta bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat secara afirmatif untuk menghindari penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. *Kedua*, Keberhasilan PKH dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial harus didukung kuat oleh peran dan visi para pendamping, dalam proses belajar bersama masyarakat dan menginisiasi usaha ekonomi produktif demi kemandirian ekonomi.

Daftar Pustaka

- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, 13.
- Ambar Teguh Sulistiyan, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004, 79.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2017, 63-64.
- John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2014 267
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya: 2014, 219.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya: 2014, 331
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009, 246
- Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006 179.

Program Keluarga Harapan, <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan>, diakses pada 09/04/19 pukul 11.00.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Data hasil Pemutakhiran Data Peserta PKH Non Eligible (NE) PPKH Kabupaten Pati tahun 2018-2019

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Vol. 10, No. 2, Desember 2019

Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam

Rio Febriannur Rachman

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang
riofrachman21@gmail.com

Abstract: This article explores one of the policies of the City Government of Surabaya, to overcome the problem of poverty, through expanding employment. By launching KORIDOR Co-Working Scape, those are facilities for the community, to develop capabilities in the digital-based creative industry. This policy is expected to produce entrepreneurs who will recruit workers. The facilities are representative places, computers, internet, and digital business assistance in the form of intensive training from experts. Observations made using qualitative methods with a case study approach. The theory used in seeing this phenomenon is public policy. Also, by looking, whether this policy is in line with the *maqâsid al-syârî'ah*, which is the concept of protecting the religion, life, mind, descent, and property of each member of the community. Economic development to realize *al-'adalah al-iqtishodiyah* (economic justice) through the development of digital media-based creative industries, can provide protection to five aspects of *maqâsid al-syârî'ah*. The majority of Muslim intellectuals argue that economic development efforts include those from *Jihad fi Sabillillah* (holy struggle in the way of God). While the use of digital media, as long as it does not violate the law of the principle of transactions in Islam, is permitted. It proves, the Islamic openness to the development of science and technology.

[Artikel ini mengupas salah satu kebijakan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan, melalui perluasan lapangan kerja. Caranya, dengan meluncurkan KORIDOR, Co-Working Scape, yang merupakan fasilitas dan sarana bagi masyarakat, untuk mengembangkan kemampuan di bidang industri kreatif berbasis digital. Kebijakan ini diharapkan dapat mencetak para pengusaha yang bakal merekrut tenaga kerja. Program ini berwujud penyediaan fasilitas dan sarana berupa tempat yang representatif, komputer, internet, serta pendampingan bisnis digital berupa pelatihan-pelatihan intensif dari para ahli. Pengamatan yang dilakukan memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang dipakai dalam melihat fenomena ini adalah kebijakan publik. Juga, dengan melihat keselarasan kebijakan ini dengan *maqâsid al-syârî'ah*, yang merupakan konsep perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tiap anggota masyarakat. Pembangunan ekonomi untuk mewujudkan *al-'adalah al-iqtishodiyah* melalui pengembangan industry kreatif berbasis media digital dapat memberikan perlindungan pada lima aspek *maqâsid al-syârî'ah*. Mayoritas intelektual muslim berpendapat bila upaya pembangunan ekonomi termasuk dari *Jihad fi Sabillillah*. Sementara penggunaan media digital, selama tidak melanggar hukum prinsip transaksi dalam Islam, diperbolehkan dan ini merupakan bentuk keterbukaan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keywords: Public Policy, Co-Working Space, Surabaya, *maqâsid al-syârî'ah*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan problem yang umumnya menerpa kota-kota besar di dunia. Termasuk, di Surabaya, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, negara berpenduduk terbanyak kelima. Tak bisa dimungkiri, Surabaya masih menghadapi masalah laten kemiskinan¹. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mencetuskan sejumlah kebijakan². Pemerintah Kota Surabaya memang memiliki tanggungjawab terhadap pemberantasan kemiskinan, terlebih, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui jargon Tujuan Pembangunan Berkelanjutannya (Sustainable Development Goals) menggariskan, semua kebijakan pemerintah mesti linier dengan tujuh belas poin pembangunan berkelanjutan, yang salah satunya adalah *No Poverty* atau meniadakan kemiskinan³. Berdasarkan sumber penyebabnya, ada beberapa faktor yang mengakibatkan kemiskinan, salah satunya, tidak adanya lapangan pekerjaan yang menjanjikan⁴.

Pada bagian lain, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berjalan pesat di kota-kota besar, termasuk di Surabaya. Masyarakat di kota ini, umumnya telah akrab dengan dunia digital, internet, dan media sosial. Fenomena ini merupakan tantangan sekaligus peluang. Secara khusus, Pemerintah Kota Surabaya berupaya merumuskan kebijakan agar pemanfaatan teknologi masyarakat bisa dilakukan secara produktif. Apalagi, Pemerintah Kota Surabaya sudah dikenal sebagai kota yang konsisten untuk melakukan optimalisasi teknologi demi reformasi birokrasi⁵.

Bagaimana memanfaatkan teknologi secara produktif? Masyarakat bisa

¹ Hotman Siahaan, "Profil Kemiskinan di Surabaya: Sebuah Analisis Fenomenologis". *Jurnal Kemiskinan* (2011): 219-227.

² Rulam Ahmadi, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (Studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya)". DIA: *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 10, No. 2 (2012): 16-31.

³ "About the Sustainable Development Goals", 2015, diakses pada 11 September 2018 <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>.

⁴ Husna Ni'matul Ulya, "Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional". *El Barka: Jurnal Economic and Business* 1, No. 1 (2018): 90-113

⁵ Suhendra, AS. "Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Cerdas di Bandung dan Surabaya". *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 1, No. 1 (2017): 1-9. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.1-9>

menggunakan teknologi komunikasi dan informasi sebagai modal menjalankan industri kreatif, mengoperasikan aplikasi-aplikasi teknologi untuk berwirausaha, maupun memromosikan produk-produk untuk dijual. Harapannya, masyarakat bisa menjadi pelaku usaha yang tidak hanya berstatus konsumen. Bertolak dari keinginan itu, Pemerintah Kota Surabaya mencetuskan program penyediaan sarana dan fasilitas Co-Working Space, pada 2017 silam⁶. Co-Working Space bernama KORIDOR yang berlokasi di lantai 3, Gedung Siola, Jalan Tunjungan, dibuat untuk menciptakan ekosistem yang cocok untuk masyarakat, agar dapat menjadi kreator, inovator, dan entrepreneur atau pelaku usaha. Targetnya, mereka bisa bersaing di ranah global.

Di KORIDOR, terdapat fasilitas internet lengkap, komputer, suasana nyaman dengan penyejuk udara, serta atmosfer yang kondusif. Di sana, masyarakat bisa belajar tentang industri kreatif dan media digital. Mereka yang bertemu, bisa saling berdiskusi serta berkarya secara kolaboratif. Beberapa ruang juga sudah disiapkan untuk kegiatan-kegiatan rutin seperti pelatihan tentang teknologi digital, markas komunitas muda, juga pameran karya seni rupa. Pada kegiatan, pelatihan, workshop serta forum diskusi tersebut, banyak narasumber berlevel regional, nasional, dan internasional, termasuk dari pihak *facebook* maupun *google*. Terdapat pula tokoh nasional seperti Chairul Tanjung, Dennis Adiswara, Vidi Aldiano, serta KORIDOR juga pernah mendapat kunjungan dari kedutaan Inggris dan Kroasia.

Melalui KORIDOR, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan wadah inkubasi untuk pengembangan potensi masyarakat dalam industri kreatif dan media digital. Muaranya, terlahir lapangan pekerjaan baru dari tiap pelaku usaha. Hingga pertengahan 2019, sudah ada 77 bisnis rintisan (*start up*), yang memiliki basecamp di KORIDOR. Sementara itu, pengunjung yang datang ke KORIDOR tiap hari, rata-rata konsisten di kisaran 253 orang. Artinya, ada kebermanfaatan yang berkelanjutan di sana⁷.

Artikel ini mengupas kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang pengembangan industri kreatif berbasis media digital melalui pengadaan Co-Working Space, berdasarkan teori maupun konsep kebijakan publik. Kebijakan

⁶ Bagian Organisasi Pemerintah Kota Surabaya, *Inovasi Pelayanan Publik*. (Surabaya: Tidak diterbitkan, 2019)

⁷ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Layanan Informasi, Humas Pemkot Surabaya, Yanuar Hermawan, 7 Juli 2019

publik didefinisikan sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, dan dilaksanakan oleh pemerintah secara resmi⁸. Kebijakan publik dapat dianalisis secara evaluatif, dengan cara melihat kondisi masyarakat sebelum dan sesudah dijalankannya kebijakan tersebut⁹. Dilihat pula keselarasannya dengan *maqâsid al-syarî'ah*, yang oleh sejumlah ulama dianggap sebagai nilai-nilai dan sasaran hukum agama¹⁰. Nilai dan sasaran tersebut secara umum berorientasi merealisasikan kemaslahatan umat¹¹.

Metode yang dipakai kualitatif, untuk menghasilkan deskripsi menyeluruh dari kondisi lapangan, melalui pembahasan terhadap dokumen maupun kutipan wawancara yang relevan. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti atau penulis sebagai instrument utama yang berkonsentrasi pada elemen empiris guna menerangkan keadaan faktual¹².

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan bentuk penelitian yang mengamati fenomena aktual dengan konteks terukur serta unik¹³. Kebijakan pengadaan Co-Working Space oleh pemerintah daerah umumnya dilakukan dengan menggandeng pihak swasta atau eksternal. Di Surabaya, uniknya, Co-Working Space ini dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Bagian Hubungan Masyarakat, serta buka selama 24 jam non-stop. Keunikan lainnya, pada 2019 ini, kebijakan yang kemudian dinamakan dengan Cak eMus ini meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, dari Kementerian Dalam Negeri. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah, pertama, studi dokumen/literatur yang berkenaan dengan kebijakan ini. Kedua, wawancara dengan narasumber yang berkompeten, ketiga, observasi.

B. KEBIJAKAN APLIKATIF MEWUJUDKAN AL-'ADALAH AL-IQTISHODIYAH

Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kota Surabaya, memiliki

⁸ James E. Anderson, *Public Policy Making* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984)

⁹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000)

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi* (Damaskus: Dâr al-Fikri, 1986)

¹¹ Al-Syâthibî, *Al-Muawâfaqât Fi Ushul al-Syarî'ah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)

¹² Yvonna S. Lincoln & Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (California: Sage, 1985)

¹³ Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods* (London: Sage Publication, 2003)

kewenangan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan apa yang dilakukan pemerintah yang berhubungan dengan isu kemasyarakatan, demi kesejahteraan umum¹⁴. Pemerintah berhak membuat hukum atau regulasi, yang mengerahkan struktur-struktur di dalamnya, demi kepentingan masyarakat¹⁵. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan suatu masalah, misalnya masalah kemiskinan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Bertolak dari konsep tersebut, bisa dipastikan kalau penyediaan KORIDOR Co-Working Space merupakan kebijakan publik yang ditelurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Sejumlah pemikir menyebutkan, kebijakan publik dikonstruksikan oleh tiga level hierarkis: policy level, organizational level, operational level¹⁶. Policy level biasanya dijalankan yudikatif dan legislative. Organizational level dijalankan oleh eksekutif. Operational level dilaksanakan oleh perangkat dari pihak eksekutif. Sebagai contoh, di tingkat Pemerintah Pusat, perangkat yang dimaksud adalah kementerian, di tingkat Pemerintah Provinsi, perangkat yang dimaksud adalah Biro, Dinas, dan lain-lain, sedangkan di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, ada dinas, bagian, badan, dan sebagainya.

Semua kebijakan publik, dilindungi dan didasari *institutional arrangement* atau peraturan perundang-undangan yang sah. Wujudnya berbeda-beda di setiap tingkat, antara lain, Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, Peraturan Bupati, dan lain sejenisnya. Seluruh regulasi, mengacu pada peraturan-peraturan lain sebelumnya, sehingga ada konsistensi dan keberlanjutan dalam setiap elemennya.

Penyediaan KORIDOR Co-Working Space merupakan salah satu kebijakan publik di Surabaya. Policy level dari kebijakan ini diperankan oleh legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. DPRD mengesahkan anggaran eksekutif dalam kebijakan ini. Organizational level dipegang Pemerintah Kota Surabaya. Ada pun operational level dilaksanakan oleh Bagian Humas sebagai perangkat yang menjadi *leading sector* kebijakan ini. *Institutional arrangement* dari kebijakan ini setidaknya didasarkan pada adanya Peraturan Daerah tentang APBD

¹⁴ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Prentice Hall, 1972)

¹⁵ James E. Anderson, *Public Policy Making* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984)

¹⁶ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI, 2006)

tahunan, yang eksisting sejak 2017 hingga tahun ini, yang di dalamnya ada aturan untuk penggunaan anggaran buat kebijakan ini.

Bagaimana implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari aspek kebermanfaatan, dengan meninjau apa yang ada sebelum dan sesudah kebijakan ini berjalan. Secara prinsip, ada sejumlah manfaat yang dirasakan masyarakat. Antara lain, warga di Surabaya memiliki alternatif tempat untuk belajar yang representatif, karena terdapat fasilitas internet gratis di dalamnya¹⁷. Mereka juga punya wadah berkumpul yang nyaman, yang dapat digunakan untuk menggarap tugas sekolah, kuliah, maupun pekerjaan¹⁸.

Kebermanfaatan kebijakan ini juga dapat ditelaah dari lini sosial dan ekonomi. Bila diperhatikan, semua program atau kegiatan yang ada di KORIDOR Co-Working Space sesuai dengan cita-cita Pemerintah Kota Surabaya yang ingin mengangkat harkat dan martabat masyarakat di bidang ekonomi. Sudah barang tentu, adanya kesetaraan sosial di masyarakat merupakan keinginan yang ditargetkan pula. Wawasan di bidang industri kreatif berbasis media digital merupakan poin penting di era kekinian. Khususnya, di era masyarakat informasi, di mana orang-orang sangat dekat dengan segala macam informasi yang terkoneksi dengan internet¹⁹.

Yang tak kalah menarik, kegiatan di KORIDOR Co-Working Space selalu melibatkan banyak pihak. Selain para Aparatur Sipil Negera (ASN) di setiap Perangkat Daerah (PD), ada pula pihak-pihak dari eksternal Pemerintah Kota Surabaya. Mereka antara lain mengambil posisi sebagai relawan yang menjadi petugas di sana sehari-hari, narasumber pelatihan, dan peran-peran sentral lainnya. Terdapat pula beberapa komunitas professional yang berkolaborasi dengan memberi bantuan atau berbagi pada masyarakat yang menggunakan fasilitas di sana, antara lain, komunitas Start Surabaya Gapura Digital, Gerakan Nasional 1000 Start Up Digital, Android Kejar Indonesia, Tata Rupa, dan Kreavi. Pemerintah Kota Surabaya tak segan berkolaborasi dengan pihak swasta untuk menjadi sponsor atau

¹⁷ Wawancara di KORIDOR Co-Working Space, dengan pengunjung yang seorang mahasiswi di kampus yang ada di Surabaya, tapi ber-KTP Sidoarjo, pada 4 April 2019

¹⁸ Wawancara di KORIDOR Co-Working Space, dengan pengunjung yang seorang siswi dari Surabaya, pada 4 April 2019

¹⁹ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)

pendukung acara²⁰.

Kebijakan ini menumbuhkan mekanisme kemitraan antara semua eksponen masyarakat. Terlebih, para aktifis yang telah sukses memiliki industri kreatif, baik di bidang start up, desainer grafis, manajemen website maupun media sosial, diarahkan pula untuk berkolaborasi dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tergabung di program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Surabaya²¹. Artinya, ada korelasi antara program satu dengan program lain di lingkup Pemerintah Kota Surabaya.

UMKM yang umumnya berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah, ikut terbantu karena produknya menjadi lebih bernilai jual. Jaringan UMKM bertambah luas, berkat pendampingan yang optimal. Kolaborasi UMKM dengan para aktifis di KORIDOR Co-Working Space membuat pelaku usaha menjadi lebih produktif²². Kemasan produk mereka juga lebih mantap karena bantuan para desainer grafis yang bereputasi²³.

Pada bagian lain, terjalin kebersamaan antar anggota masyarakat atau umat di suatu wilayah, demi pertumbuhan dan keadilan pemerataan ekonomi. Dalam konteks kebersamaan ini, Islam mengajarkan umat untuk berjuang secara berjamaah. Ada keselarasan antara kebijakan penyediaan KORIDOR Co-Working Space ini dengan perintah Islam, untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran dalam barisan yang rapat selayaknya suatu bangunan yang tersusun kokoh²⁴. Implementasi kebersamaan dan persatuan umat melalui kemitraan ini, juga senafas dengan sebuah riwayat yang mewajibkan kaum muslimin untuk bersatu

²⁰ "Inovasi Co-Working Space", 2018, diakses pada 16 Mei 2019 <https://organisasi.surabaya.go.id/home/file/pelayanan%20publik/masuk%20web/proposal%20%20koridor.pdf>

²¹ Rio Febriannur Rachman, "Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya". *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2 (Oktober 2019): 273-292

²² Abdul Hakim, "Pahlawan Ekonomi Efektif Kembangkan Industri Kreatif di Surabaya", *Antara News*, 20 Maret 2019, <https://m.antaranews.com/amp/berita/812795/pahlawan-ekonomi-efektif-kembangkan-industri-kreatif-di-surabaya>

²³ "Walikota Risma Kembali Melaunching Tata Rupa Prime yang Bantu Desain Produk UKM Surabaya", 2018, diakses pada 28 Juli 2019, <https://humas.surabaya.go.id/2018/08/13/wali-kota-risma-kembali-melaunching-tata-rupa-prime-yang-bantu-desain-produk-ukm-surabaya/>

²⁴ Al-Quran Surah Ash-Shof (61) ayat 4

di *Al-Jamaah* atau kelompok, sekaligus waspada pada bibit-bibit perpecahan yang mungkin timbul dari hasad maupun kedengkian²⁵.

Di antara tujuh belas poin dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicetuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa²⁶, terdapat poin *Sustainable Cities and Communities*. Kebijakan penyediaan KORIDOR Co-Working Space selaras dengan poin ini, karena memerlukan hubungan komunal di kota Surabaya. Kebijakan ini juga selaras dengan poin *Life in Land*, karena basis dari industri kreatif di sini berfokus pada ranah digital. Artinya, ada semangat *paperless*, yang sesuai dengan upaya mengurangi penebangan pohon sebagai salah satu kehidupan yang ada di muka bumi. Yang secara tidak langsung pula, senada dengan poin *Climate Action* atau upaya melestarikan lingkungan sebagai sikap pada isu perubahan iklim.

Ada sejumlah tujuan dari penerapan hukum Islam di bidang ekonomi, salah satunya, terjadinya pemerataan atau keadilan ekonomi atau Al-'adalah Al-iqtisadiyah. Sebagian ulama mengkiasakan, keadilan ekonomi tersebut berkaitan dengan distribusi pendapatan dan atau kekayaan²⁷. Islam mengajarkan pada para pengikutnya, untuk mengupayakan kebersamaan dalam menikmati kekayaan yang ada di muka bumi, tidak serakah, sehingga harta kekayaan tidak Cuma beredar dalam satu kelompok konglomerasi²⁸. Patut diketahui, bahwa harta, uang maupun produk-produk konsumsi, harus beredar di masyarakat tanpa adanya monopoli, karena ia memiliki fungsi sosial²⁹.

Kebijakan pengembangan industri kreatif berbasis media digital, melalui penyediaan KORIDOR, yang digelorakan oleh Pemerintah Kota Surabaya terbukti memberikan dampak bagi masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut dapat diukur dan dilihat secara transparan. Pengukuran bisa dilaksanakan secara komprehensif sejak tahap perumusan, implementasi, dan evaluasi, dengan melihat kondisi sebelum dan sesudah kebijakan berjalan, dengan melihat tujuan-tujuan yang telah dicapai³⁰. Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya ini,

²⁵ HR Tirmidzi

²⁶ "About the Sustainable Development Goals", 2015, diakses pada 11 September 2018, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>. Diakses pada 11

²⁷ Al-Quran Surah Al Hasyr (59) ayat 7

²⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Islamica*, 6, No. 2 (Maret 2012): 316-328

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

³⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Med Press, 2007)

merupakan wujud tanggungjawab pemerintah, yang sudah seharusnya ikut berperan sentral dalam mengatur perekonomian masyarakat di semua lapisan³¹.

Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, memang merupakan tanggungjawab pemerintah. Keadilan ekonomi harus dikelola dengan baik oleh pemerintah di setiap level, baik negara maupun daerah³². Di sisi lain, bila ditelaah dengan seksama, pengembangan industri kreatif berbasis media digital melalui pengadaan Co-Working Space, memiliki upaya menguatkan ekonomi kerakyatan. Di dalam ekonomi yang kuat, keselamatan jiwa, harta, keturunan dan akal, bahkan iman seseorang bisa lebih terjaga, yang lima hal tadi merupakan elemen prinsip dalam prinsip *maqâsid al-syârî'ah*.

C. TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI SARANA MUAMALAH

Di era masyarakat digital seperti sekarang ini, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi bagi semua eksponen masyarakat, termasuk institusi pemerintah, sudah tidak terelakkan³³. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dengan penyediaan KORIDOR Co-Working Space, sebagai penopang industri kreatif berbasis digital di masyarakat, merupakan langkah kongkret menjawab tantangan zaman. Sudah sepantasnya, pemerintah di setiap level, pada masing-masing institusi, sanggup mengelola kemajuan teknologi sehingga semua potensi bisa dimaksimalkan³⁴.

Pemerintah mesti lihai menyandingkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dengan misi kepentingan kebijakan³⁵. Termasuk di dalamnya, pada kebijakan yang berkenaan dengan penyebaran informasi, sosialisasi, promosi, dan

³¹ M. Arif Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam". *Iqtishadia*, 8, No. 1, (Maret 2015): 19-40

³² Indra Hidayatullah. "Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar". *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8, No. 1 (April 2019): 183-208

³³ Rio Febrinnur Rachman. "Menelaah Riuhan Budaya Masyarakat di Dunia Maya." *Jurnal Studi Komunikasi* 1. No. 2 (2017): 206-222.

³⁴ Sad Dian Utomo, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan" dalam Indra J. Pilang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, (Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, 2003)

³⁵ Ayuning Budiati, et al. "IT governance sektor publik di Indonesia: Konsep dan kebijakan", *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia* (2006): 57-61

apa saja yang secara nyata berkaitan dengan masyarakat luas³⁶. Terlebih, berdasarkan data Asosiasi Pengguna Jasa Internet, di tahun 2016³⁷, terdapat 132,7 juta orang atau setara dengan 60 persen penduduk Indonesia yang telah terakses oleh internet. Sedangkan bila melihat dari jumlah penggunaan gawai, angka unit yang dimiliki, berada di atas jumlah manusia yang memiliki gawai, hingga 130 persen. Dengan kata lain, seseorang bisa jadi memiliki dua atau lebih gawai.

Masyarakat makin dekat dengan dunia digital. Sehingga apa yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dengan memberi fasilitas dan sarana pemanfaatan internet sudah selaras dengan era kekinian. Aktivitas manusia belakangan ini sudah dipengaruhi arus informasi yang terhubungan secara digital melalui internet. Sejalan dengan itu, masyarakat makin bergantung pada informasi yang diperoleh secara lebih lekas melalui gawai³⁸.

Islam memiliki sifat inklusif terhadap segala jenis perubahan sosial³⁹. Maka itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selalu bisa diterima dan kompatibel dengan agama ini⁴⁰. Pada bidang bermuamalah, termasuk bertransaksi atau berbisnis, Islam juga tidak anti pada penggunaan teknologi. Oleh sebab itu, industri kreatif berbasis media digital juga tidak masuk dalam kategori terlarang. Bila ditarik lebih jauh, jual beli *online* juga mendapat ruang. Meski memang, jual beli konvensional maupun yang berbasis kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau *online* ada yang haram, serta ada yang halal⁴¹.

Sebagian ulama berpendapat, asalkan memenuhi rukun akad syariah, jual beli *online* diperbolehkan⁴². Rukun tersebut di antaranya,

³⁶ Rachmat Kriyantono. "Konstruksi humas dalam tata kelola komunikasi lembaga pendidikan tinggi di era keterbukaan informasi publik". *Pekommas* (2015): 18.2

³⁷ "Survey Internet APJII 2016", 2016, diakses pada 23 Januari 2019, <https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016>

³⁸ Rahma Sugihartati, *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, 2014)

³⁹ Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam". *At-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, No. 1 (2016): 197-221

⁴⁰ Jamal Fakhri, "Sains Dan Teknologi Dalam Al-Qur'an". *TA'DIB* 15. No. 1. (Juni 2010): 121-142

⁴¹ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3. No. 1 (Maret 2017): 52-62

⁴² M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam". *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13, No. 1, (Juni 2013): 33-48

terdapat penjual dan pembeli, *sighah* atau *ijab qobul* di mana kedua belah pihak menyetujui syarat dan kondisi dalam transaksi, kejelasan objek pada transaksi, dan tujuan akad harus linier dengan syariat, dan tidak untuk merugikan agama atau humanisme⁴³. Sementara itu, azas yang menjadi syarat sah jual beli *online* adakah kehalalan dan kejelasan produk⁴⁴, mutu dan harga sesuai, serta adanya kejujuran, kesepakatan, dan saling kerelaan⁴⁵.

Penjelasan tentang jual beli *online* ini penting disampaikan, berkenaan dengan kegiatan yang ada di KORIDOR Co-Working Space, sebab dalam kegiatan di sana ada aktifitas penguatan e-commerce atau jual beli *online*. Terlebih, di era digital seperti keberadaan transaksi *online* tidak bisa terbantahkan⁴⁶. Salah satu topik pelatihan yang digandrungi masyarakat juga berhubungan dengan e-commerce. Seperti sempat disampaikan di bagian terdahulu, para aktifis di KORIDOR Co-Working Space juga memberi pendampingan pada UMKM di Surabaya, di mana mereka diminta untuk memanfaatkan media digital dan media sosial demi pemasaran⁴⁷. Di KORIDOR Co-Working Space sendiri, terdapat sejumlah narasumber dari facebook dan Google⁴⁸ yang telah memiliki agenda pelatihan rutin. Tentu saja, tema yang disampaikan seputar penumbuhan industry kreatif dan optimalisasi media digital.

Kebijakan KORIDOR Co-Working Space ini tidak sukar direplikasi atau kompatibel untuk dilaksanakan di daerah lain⁴⁹. Yang terpenting, terdapat

⁴³ Muhammad bin Idris al-Shafi'i. *al-Umm*. (Damasukus: Dar al-Fikr, 1990)

⁴⁴ Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani. *Bada'i' al-Sanai' fi Tartib al-Sharai'*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003)

⁴⁵ Nasrul Hisyam Nor Muhamad, "Aplikasi Sains Dan Teknologi Dalam Transaksi Muamalah Islam". *Jurnal Teknologi: Universiti Teknologi Malaysia* 49, No. 1 (2008): 81–91

⁴⁶ Annisa Dwi Kurniawati, "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Islam", *el-Barka: Jurnal Economic and Business*, 2, No. 1, (Januari-Juni 2019): 90-113

⁴⁷ Fitri Rachmawati. "Penerapan Digital Marketing sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pahlawan Ekonomi Surabaya". Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

⁴⁸ Gita Amanda, "Facebook Kunjungi Pelaku UMKM di Surabaya", *Republika*, 3 Juni 2019, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/06/03/pshxaw423-facebook-kunjungi-pelaku-umkm-di-surabaya>

⁴⁹ Tomi Sudjatmiko, "Top Inovator Harus Tularkan Inovasinya", *KR Jogja*, 19 Juli 2018, https://krjogja.com/web/news/read/72249/Top_Inovator_Harus_Tularkan_Inovasinya

kekompakan antar eksponen masyarakat, dan adanya komitmen dari pemerintah setempat. Kebersamaan merupakan kunci utama. Kebanggaan dan rasa kekeluargaan yang merupakan kultur lokal Surabaya, menjadi kekuatan tersendiri dalam implementasi kebijakan di Surabaya⁵⁰. Sejauh ini, telah banyak elemen pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat dari pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, dan lain sebagainya, yang melakukan studi banding ke tempat ini⁵¹.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia untuk pembangunan sosial (*World Summit on Social Development*) di Kopenhagen, Denmark, pada 6-12 Maret 1995, disampaikan tiga dimensi yang perlu mendapat attensi semua pihak, khususnya pemerintah. Yakni, dimensi kemiskinan, dimensi ketenagakerjaan, dan dimensi integrasi sosial⁵². Semua kebijakan pemerintah, diharapkan punya korelasi terhadap tiga dimensi tadi.

Keberadaan KORIDOR Co-Working Space bersentuhan dengan dimensi kemiskinan, karena program yang ada di dalamnya bertolak dari semangat membangkitkan ekonomi produktif guna memerangi kemiskinan. Bentuknya, dengan penyediaan lapangan kerja. Dalam aspek ini, pada konteks yang sama, dimensi ketenagakerjaan juga disentuh. Secara umum, pemerintah memang wajib menaruh perhatian pada penumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada solusi atas kemiskinan dan ketenagakerjaan⁵³. Apabila kemiskinan digerus, masyarakat sudah memiliki pekerjaan yang representative, kesenjangan sosial pun terkikis. Artinya, muncul integrasi sosial yang berlandaskan kesejahteraan ekonomi.

Islam mengatur keseimbangan antara kebutuhan individual dan sosial⁵⁴. Maka itu, manusia tidak boleh egois dan memikirkan dirinya sendiri. Program yang ada di KORIDOR Co-Working Space bertumpu pada upaya kolaboratif. Di mana manusia sebagai makhluk sosial, bersama pihak-pihak atau orang lain, bergandeng

⁵⁰ Soedarso, et al. "Dinamika Multikultural Masyarakat Kota Surabaya". *Jurnal Sosial Humaniora*, 6, No. 1 (2013): 62-75.

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Layanan Informasi, Humas Pemkot Surabaya, Yanuar Hermawan, 7 Juli 2019

⁵² Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik*. (Bandung: CV Alfabeta, 2014)

⁵³ Izzah Masruroh & Muhammad Farid. "Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang". *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 1, (April 2019): 209-229

⁵⁴ Mursal & Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup", *Jurnal Penelitian* 9, No. 1, (Februari 2015): 67-92

tangan meraih kesuksesan bersama. Manusia memang memiliki keinginan individu, tapi wajib tetap memerhatikan kondisi sekitar. Dengan demikian, keseimbangan terwujud dan keadilan dapat merata dirasakan umat⁵⁵. Problem sosial, termasuk persoalan ekonomi, pasti lebih gampang dipecahkan bila dirumuskan bersama demi kemaslahatan umat.

Pengembangan industri kreatif berbasis media digital, baik dengan pemasaran karya-karya desain, website, e-commerce, dan penguatan UMKM, bertujuan untuk menumbuhkan iklim wirausaha. Hal itu selaras dengan anjuran Nabi Muhammad Sholallahu alaihi Wasalam, yang dalam salah satu riwayat menyampaikan, penghasilan terbaik adalah yang diperoleh dari upayanya sendiri, dan konsep wirausaha di KORIDOR Co-Working Space ini juga berbasis pada kemandirian⁵⁶. Dalam sejumlah riwayat disebutkan, para pedagang atau wirausahawan yang jujur akan mendapat kemuliaan dari Tuhan dan bersama orang-orang beruntung di akhirat kelak⁵⁷. Yang terpenting, para penerima manfaat nantinya harus berorientasi pada penyediaan produk berupa barang dan jasa berkualitas⁵⁸. Sebagaimana prinsip muamalah dalam Islam yang mengharuskan penyedia produk memberikan pelayanan terbaik. Mereka juga dilatih tentang pentingnya strategi dalam berwirausaha, ketekunan, inovasi, dan kreatifitas⁵⁹.

D. PENUTUP

Pengembangan industri kreatif berbasis media digital di Surabaya, melalui pengadaan KORIDOR Co-Working Space dijalankan dengan mengabaikan azas kapitalisme. Sebab, Pemerintah Kota tidak berharap ada profit atau keuntungan dari material yang bersifat satu arah dari pemakaian sarana atau fasilitas tersebut. Tidak ada retribusi, pajak, atau pungutan lainnya. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan sarana dan fasilitas, agar masyarakat bangkit dan berkreasi di sana,

⁵⁵ Heri Junaidi & Cholidi Zainuddin, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal", *Jurnal Muamalah* 3 No. 1 (Juni 2017): 1-14

⁵⁶ HR. Ibnu Majah di dalam As-Sunan

⁵⁷ HR Tirmidzi nomor 1209

⁵⁸ Sri Hartini, "Peran Inovasi: Pengembangan Kualitas Produk Dan Kinerja Bisnis". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 14, No. 1 (2012): 83-90.

⁵⁹ P. Surjani, "Manajemen Strategi Dalam Menghadapi Era Globalisasi". *Unitas* 11. No. 1 (2002): 20-36.

menjalankan industri kreatif, dan berkolaborasi. Muaranya, tercapai kesejahteraan bersama sehingga senada dengan prinsip ekonomi Islam⁶⁰.

Melalui kebijakan ini, diharapkan muncul simbiosis mutualisme, yang menguntung Pemerintah Kota Surabaya dalam wujud pelayanan aplikatif, dan yang menguntungkan masyarakat secara individu maupun komunal. Pada satu titik, muncul kondisi di mana masyarakat menjadi kreatif dan inovatif, serta sanggup memanfaatkan media digital secara maksimal. Mekanisme ekonomi yang saling menguntungkan tanpa eksplorasi pihak-pihak tertentu ini, selaras dengan kaidah Islam yang humanis dan universal⁶¹.

Dalam perkembangan pemikiran Islam, sejumlah ulama kontemporer menyebutkan, *maqâsid al-syarî'ah* atau tujuan adanya hukum syariah, merupakan konsep yang berkonsentrasi pada terciptanya perlindungan bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia⁶². Kebijakan yang berbasis pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya yang berfokus pada industry kreatif berbasis media digital, berpotensi mewujudkan perlindungan pada lima poin yang dimaksud⁶³. Lebih lanjut, bila mengacu pada pendapat sebagian pakar yang menyebutkan bila pembangunan ekonomi termasuk dari *Jihad fi Sabillah*⁶⁴, apa yang dilakukan di Surabaya ini pun bisa masuk kategori perjuangan di bawah panji agama.

Sebagai bentuk kebijakan publik, adanya KORIDOR Co-Working Space dapat dilihat secara objektif di aspek kebermanfaatannya⁶⁵. Selain data yang menunjukkan adanya konsistensi pengunjung, dan jumlah komunitas yang terus berproduksi di sana, serta kolaborasi dengan UMKM di kota ini, banyaknya pengunjung saat adanya pelatihan-pelatihan industri kreatif berbasis media digital juga dapat dijadikan variabel ukuran. Warga yang memiliki *senses of belonging*

⁶⁰ Zainil Ghulam. "Membincang Ekonomi Islam dan Kapitalisme". *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 4, No. 2, (Oktober 2015): 1-12

⁶¹ Muhammad Hanif al Hakim, "The Behaviour Of Economic Agent In Islam". *El-Barka: Journal Economic and Business*. 2, No. 1 (Januari – Juni 2019): 1-24

⁶² Ali Mutakin, "Teori Maqâsid Al Syarî'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istimbat Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19. No. 3, (Agustus 2017): 547-570

⁶³ Muhammad Abdul Mun'im Affar, *al-Takhtith wa al-Tanmiyah fi al-Islam*, (Jeddah: Dar al-bayan al-Arabi, 1985)

⁶⁴ Asmuni, "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam". *Al Mawrid*, edisi X (2003): 128-151

⁶⁵ William N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000)

terhadap fasilitas di sana, sehingga ikut menjaga dan merawat sarana yang ada, juga merupakan salah satu wujud keberhasilan program.

Kebijakan ini menjadi terjamin keberlanjutannya karena ada atensi khusus dari Wali Kota Surabaya, sebagai pemimpin tertinggi di Pemerintah Kota Surabaya. Juga, kehadiran pihak DPRD untuk memberi pendapat, masukan, atau kritikan. Media Massa atau pers, juga dipersilakan menjadi unsur kontrol sosial. Semua program di KORIDOR Co-Working Space dijalankan secara transparan dan siap menghadapi masukan dari masyarakat yang bisa disalurkan melalui akun resmi media sosial Pemerintah Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Affar, Muhammad Abdul Mun'im. *al-Takhtith wa al-Tanmiyah fi al-Islam*,

Ahmadi, Rulam. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (Studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya)". DIA: *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 10, No. 2 (2012): 16-31.

Al-Kasani, Abi Bakr bin Mas'ud. *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Sharai'*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003)

Al-Syâthibî. *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*. Damaskus: Dâr al-Fikri, 1986.

Amanda, Gita. "Facebook Kunjungi Pelaku UMKM di Surabaya", *Republika*, 3 Juni2019, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/06/03/pshxaw423-facebook-kunjungi-pelaku-umkm-di-surabaya>

Anderson, James E. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984.

Rio Febriannur Rachman

Arif, M. Nur Rianto Al. "Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam". *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13, No. 1, (Juni 2013): 33-48

Asmuni, "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam". *Al Mawrid*, edisi X (2003): 128-151

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "Survey Internet APJII 2016", 2016, diakses pada 23 Januari 2019, <https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016>

Azhari, Fathurrahman. "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam". *At-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, No. 1 (2016): 197-221

Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya. "Walikota Risma Kembali Melaunching Tata Rupa Prime yang Bantu Desain Produk UKM Surabaya", 2018, diakses pada 28 Juli 2019, <https://humas.surabaya.go.id/2018/08/13/wali-kota-risma-kembali-melaunching-tata-rupa-prime-yang-bantu-desain-produk-ukm-surabaya/>

Bagian Organisasi Pemerintah Kota Surabaya, *Inovasi Pelayanan Publik*. Surabaya: Tidak diterbitkan, 2019.

Bagian Organisasi Pemerintah Kota Surabaya. "Inovasi Co-Working Space", 2018, diakses pada 16 Mei 2019, <https://organisasi.surabaya.go.id/home/file/pelayanan%20publik/masuk%20web/proposal%20%20koridor.pdf>

Budiati, Ayuning et al. "IT governance sektor publik di Indonesia: Konsep dan kebijakan", *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia* (2006): 57-61

Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.

Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, 1972.

Fakhri, Jamal. "Sains Dan Teknologi Dalam Al-Qur'an". *TA'DIB* 15. No. 1. (Juni 2010): 121-142

Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3. No. 1 (Maret 2017): 52-62

Ghulam, Zainil. "Membincang Ekonomi Islam dan Kapitalisme". *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 4, No. 2, (Oktober 2015): 1-12

Hakim, Abdul. "Pahlawan Ekonomi Efektif Kembangkan Industri Kreatif di Surabaya", *Antara News*, 20 Maret 2019, <https://m.antaranews.com/amp/berita/812795/pahlawan-ekonomi-efektif-kembangkan-industri-kreatif-di-surabaya>

Hakim, M. Arif Hakim. "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam". *Iqtishadia*, 8, No. 1, (Maret 2015): 19-40

Hakim, Muhammad Hanif al. "The Behaviour Of Economic Agent In Islam". *EI-Barka: Journal Economic and Business*. 2, No. 1 (Januari – Juni 2019): 1-24

Hartini, Sri. "Peran Inovasi: Pengembangan Kualitas Produk Dan Kinerja Bisnis". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 14, No. 1 (2012): 83-90.

Hidayatullah, Indra. "Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar". *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8, No. 1 (April 2019): 183-208

Jeddah: Dar al-bayan al-Arabi, 1985.

Junaidi, Heri & Cholidi Zainuddin, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal", *Jurnal Muamalah* 3 No. 1 (Juni 2017): 1-14

Kriyantono, Rachmat. "Konstruksi humas dalam tata kelola komunikasi lembaga pendidikan tinggi di era keterbukaan informasi publik". *Pekommas* (2015): 18.2

Rio Febriannur Rachman

Kurniawati, Annisa Dwi. "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Islam", *e-Barka: Journal Economic and Business*, 2, No. 1, (Januari-Juni 2019): 90-113

Lincoln, Yvonna S. & Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. California: Sage, 1985.

Masruroh, Izzah & Muhammad Farid. "Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang". *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 1, (April 2019): 209-229

Muhamad, Nasrul Hisyam Nor. "Aplikasi Sains Dan Teknologi Dalam Transaksi Muamalah Islam". *Jurnal Teknologi: Universiti Teknologi Malaysia* 49, No. 1 (2008): 81–91

Muhammad bin Idris al-Shafi'i. *al-Umm*. (Damasukus: Dar al-Fikr, 1990)

Mursal & Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup", *Jurnal Penelitian* 9, No. 1, (Februari 2015): 67-92

Mutakin, Ali. "Teori Maqâshid Al Syarî'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istimbath Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19. No. 3, (Agustus 2017): 547-570

Nasdian, Fredian Tonny. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur. "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Islamica* 6, No. 2 (Maret 2012): 316-328

Perserikatan Bangsa-Bangsa. "About the Sustainable Development Goals", 2015, diakses pada 11 September 2018
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>.

Rachman, Rio Febriannur. "Menelaah Riuhan Budaya Masyarakat di Dunia Maya." *Jurnal Studi Komunikasi* 1. No. 2 (2017): 206-222.

Rachman, Rio Febriannur. "Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya". *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2 (Oktober 2019): 273-292

Rachmawati, Fitri. "Penerapan Digital Marketing sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pahlawan Ekonomi Surabaya". Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Siahaan, Hotman. " Profil Kemiskinan di Surabaya: Sebuah Analisis Fenomenologis". *Jurnal Kemiskinan* (2011): 219-227.

Soedarso, et al. "Dinamika Multikultural Masyarakat Kota Surabaya". *Jurnal Sosial Humaniora*, 6, No. 1 (2013): 62-75.

Sudjatmiko, Tomi. "Top Inovator Harus Tularkan Inovasinya", *KR Jogja*, 19 Juli 2018,https://krjogja.com/web/news/read/72249/Top-Inovator-Harus-Tularkan_Inovasinya

Sugihartati, Rahma. *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2014.

Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta, 2014

Suhendra, AS. "Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Cerdas di Bandung dan Surabaya". *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 1, No. 1 (2017): 1-9. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.1-9>

Surjani, P. "Manajemen Strategi Dalam Menghadapi Era Globalisasi". *Unitas* 11. No. 1 (2002): 20-36.

Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, 2006.

Rio Febriannur Rachman

Ulya, Husna Ni'matul. "Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional". *El Barka: Journal Economic and Business* 1, No. 1 (2018): 90-113

Utomo, Sad Dian. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan" dalam Indra J. Piliang, Ramdani, Dendi dan Agung Pribadi, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, 2003.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press, 2007.

Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. London: Sage Publication, 2003.

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

PETUNJUK PENULISAN

Komunitas menerima tulisan dalam bentuk artikel dan laporan penelitian, baik yang menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, maupun Arab, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan tersebut belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam suatu jurnal berkala atau buku.
2. Topik tulisan berkisar pada kajian-kajian yang berkaitan dengan; Kesejahteraan Sosial, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Islam, Pekerjaan Sosial, Layanan Sosial, Kajian Sosial Keagamaan, dan Pembangunan Sosial.
3. Judul tulisan maksimal 14 kata.
4. Semua tulisan harus menyertakan abstrak (100-150 kata) dan kata kunci (3-7 kata).
5. Jumlah halaman antara 15-20 halaman dengan ukuran kwarto spasi ganda dengan menggunakan jenis huruf Arial dan besar huruf 12 pt.
6. Setiap kata arab yang belum resmi terbarukan dalam bahasa Indonesia ditulis mengikuti pedoman transliterasi yang ditetapkan dan cara penulisannya dimiringkan (*italic*), hal ini juga berlaku untuk kata-kata asing yang lain (seperti bahasa Inggris dan bahasa daerah) dan cara penulisan dimiringkan (*italic*).
7. Transliterasi tidak berlaku untuk nama orang, tempat, institusi, dan sejenisnya.
8. Penulis mengirimkan naskahnya atau melakukan *submission* dengan mengikuti prosedur *Open Journal System* (OJS) pada link <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas>.
9. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote* dengan teknik penulisan sebagai berikut: Nama Penulis, Judul Buku Yang Ditulis Miring (Kota Penerbit: Nama Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman. Sebagai contoh:
 - a. **Buku atau Kitab:**
Spencer Crump, *Fundamental of Journalism*, New York: McGraw Hill Book Company, 1972, 24.
Parada Harahap, *Kemerdekaan Pers*, Jakarta: Akademi Wartawan Press, 1997, 12.
Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1992, 67.
 - b. **Buku Terjemahan:**
Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah, t.t, 563-564.
 - c. **Artikel dalam Buku atau Ensiklopedi:**
Nurcholid Majid, "Cendekiawan dan Penguatan Civil Society di Indonesia" dalam *Peran Cendekiawan Muslim Dalam Menegakkan Hak Politik*

CivilSociety, ed. Tim Editor Masika, Jogjakarta: Bintang Budaya, 1996, 124.

D.S. Adam, "Theology," *Encyclopedia of Religion and Ethics*, ed. James Hastings, Jilid 4, New York: Charles Scribner's Sons, tt, 293.

d. Artikel dalam Jurnal:

Anom Surya Putra, "Pluralisme Wacana Impor yang Hengkang dari Realitas," dalam *Jurnal Ullumuna*, Vol. 8 No. 2, Matarama: IAIN Mataram, Desember 1999, 203.

e. Artikel dalam Media Massa:

Andi Aladin, "Global Warming", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

f. Kitab Suci:

QS. al-Qashash (28): 5. Perjanjian Baru, Yoh (20): 31.

- g.** Bila mengutip ulang referensi yang sama secara berurut, maka cukup tulis: Ibid. Jika halamannya berbeda, cukup tambahkan nomor halamannya: Ibid., 14.
- h.** Bila referensi terkutip ulang berselang oleh satu atau lebih referensi berbeda, maka cukup tulis *lastname* pengarang berikut satu kata awal judul dari referensi dimaksud. Misalnya, Zahrah, Ushul..., 35.
- i.** Selain mencantumkan *footnote*, penulis juga harus mencantumkan DAFTAR PUSTAKA, dengan aturan diurutkan secara alfabetis. Nama penulis mendahulukan nama marga atau nama akhir jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, judul buku atau nama jurnal maupun nama media massa ditulis miring (Kota Penerbit: Lembaga Penerbit, Tahun Terbit) tanpa diakhiri tanda titik.

Contoh:

Buku: Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Jurnal: Ismail, Faisal, "On Developing Liberation Theology in Islam," dalam *Jurnal Gazwatul Fikri*, Vol. 9 No. 2, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Desember 1999.

Media Massa: Aladin, Andi, "Global Warning", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

Makalah: Sa'i, Muhammad, "Tantangan dan Peluang Alumni Fakultas Dakwah", dalam *Makalah Seminar Prospek Alumni Fakultas Dakwah*, Mataram, 5 Desember 2008.